



LAPORAN KINERJA

BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS I
BANDUNG

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah salah satu amanat rakyat yang dibebankan kepada instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pertanggung jawaban ini meliputi seluruh pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yang merupakan satuan kerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif serta bekerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Semester I Tahun Anggaran 2024.

Kami harapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan serta rekomendasi dalam pengambilan kebijakan.

Bandung, 30 Juli 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung



dr. Sedy Dwisangka, M.Epid.

NIP. 196901042002121003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Semester I Tahun Anggaran 2024 secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2020 – 2024. Dari 9 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2024 yang dijanjikan oleh Kepala Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja, yaitu:

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN dengan capaian sebesar 0,93 dari target 0,96 (97%).
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian sebesar 100 dari target 98 (102%).
3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di di Pelabuhan/Bandara/PLBN dengan capaian sebesar 1 dari target 0,97 (105,26%).
4. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 42,27 dari target 82 (51,55%).
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan capaian sebesar 94,39 dari target 93 (100,42%).
6. Kinerja implementasi WBK satker dengan capaian sebesar 85,82 dari target 82 (105%).
7. Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya dengan capaian sebesar 60,89% dari target 80% (76,23%).
8. Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 95% (105,26%)
9. Persentase Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar 46,64% dari target sebesar 96% (48,58%). Pagu anggaran Tahun 2024 BKK Kelas I Bandung sejumlah Rp. 25.209.373.000,- dan realisasi sejumlah Rp. 11.972.659.846,-
10. Rata – rata capaian kinerja Tahun 2024 di BKK Kelas I Bandung sebesar 87,68%

Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di lingkungan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung pada akhir tahun 2024, diharapkan para Pelaksana Program melakukan evaluasi dan meningkatkan mutu perencanaan, koordinasi rutin, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 LATAR BELAKANG.....	8
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	13
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	14
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA.....	16
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
1.1 PERENCANAAN KINERJA	21
1.2 PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
2.1 CAPAIAN KINERJA.....	25
2.1.1 INDIKATOR PERTAMA	26
2.1.2 INDIKATOR KEDUA	38
2.1.3 INDIKATOR KETIGA	51
2.1.4 INDIKATOR KEEMPAT	60
2.1.5 INDIKATOR KELIMA	65
2.1.6 INDIKATOR KEENAM	72
2.1.7 INDIKATOR KETUJUH.....	78
2.1.8 INDIKATOR KEDELAPAN.....	82
2.1.9 INDIKATOR KESEMBILAN.....	84
2.1.10 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	89
2.2 REALISASI ANGGARAN	93
BAB IV PENUTUPAN.....	100
3.1 KESIMPULAN	100
3.2 TINDAK LANJUT.....	100

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Distribusi Pegawai di Lingkungan BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	16
Grafik 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024.....	16
Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	17
Grafik 3.1 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara / Pelabuhan / PLBN BKK Kelas I Bandung Tahun 2023-2024.....	28
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara / Pelabuhan / PLBN Parameter Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan BKK Kelas I Bandung Semester I Tahun 2023-2024	28
Grafik 3.3 Persentase Capaian Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan 29	
Grafik 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN dengan Target Jangka Menengah	30
Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN dengan BKK Sejenis Pada Semester I Tahun 2024.....	31
Grafik 3.6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	38
Grafik 3.7 Perbandingan Indikator Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Tahun 2023 dengan Tahun 2024	39
Grafik 3.8 Capaian Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Tahun 2020 – 2024.....	41
Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Faktor Risiko yang dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan KKP Sejenis Pada Tahun 2024.....	42
Grafik 3.10 Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Terbang dan Sertifikat Ijin Angkut Orang Sakit	44
Grafik 3.11 Jumlah Faktor risiko yang dikendalikan pada Jamaah haji yang sakit.....	44
Grafik 3.12 Jumlah Kunjungan poliklinik Embarkasi/Debarkasi perbulan tahun 2023.....	45
Grafik 3.13 Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada pelayanan vaksinasi	46
Grafik 3.14 Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada skrining TB dan HIV Aids.....	46
Grafik 3.15 Faktor Risiko yang dikendalikan pada barang.....	48
Grafik 3.16 Jumlah Faktor Risiko Lingkungan yang Ditemukan dan Dikendalikan Tahun 2024	48
Grafik 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024	52
Grafik 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.....	53
Grafik 3.19 Persentase Capaian Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2024.....	54

Grafik 3.20 Perbandingan Target dan Capaian dengan Target Jangka Menengah (2023 – Jangka Akhir Tahun 2024)	55
Grafik 3.21 Perbandingan Persentase Realisasi dengan Satuan Kerja Lain yang Sejenis ...	56
Grafik 3.22 Indikator Nilai Kinerja Anggaran.....	61
Grafik 3.23 Target dan Capaian Kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024	61
Grafik 3.24 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran di BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2020 s.d 2024.....	62
Grafik 3.25 Perbandingan Jangka Akhir Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dan 2024	63
Grafik 3.26 Perbandingan Jumlah Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2024 dibandingkan dengan KKP Sejenis	64
Grafik 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2020 s.d Juni 2024.....	68
Grafik 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2022 s.d Juni 2024.....	68
Grafik 3.29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BKK Kelas I Bandung pada Juni 2024 dibandingkan dengan BKK Sejenis.....	69
Grafik 3.30 Perbandingan Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Bandung	73
Grafik 3.31 Perbandingan Capaian Indikator Penunjang.....	74
Grafik 3.32 Perbandingan capaian Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2020 s.d 2024.....	75
Grafik 3. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2020 dengan Target 2020 – 2024	75
Grafik 3. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja BKK Kelas I Bandung dengan BKK Sejenis Tahun 2024.....	76
Grafik 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya JPL di BKK Kelas I Bandung	78
Grafik 3.36 Perbandingan Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya di BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2020 s.d 2024	79
Grafik 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Semester 1 Tahun 2024 Ini Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2023 s.d.2024 sesuai Target Perencanaan Strategis Organisasi.....	80
Grafik 3.38 Perbandingan Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya di BKK Kelas I Bandung pada Tahun 2024 dibandingkan dengan BKK Sejenis	81
Grafik 3.39 Target dan Realisasi persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah tuntas ditindaklanjuti	83
Grafik 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Juni 2024.....	84

Grafik 3. 41 Perbandingan realisasi Juni 2024 dan beberapa tahun sebelumnya.....	85
Grafik 3. 42 Perbandingan realisasi dengan capaian kinerja jangka menengah	86
Grafik 3.43 Perbandingan realisasi capaian Juni 2024 dengan BKK sejenis	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	18
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	19
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Program BKK Kelas I Bandung Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	23
Tabel 2. 3 Revisi Perjanjian Kinerja Revisi BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	24
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKK Kelas I Bandung Semester I Tahun 2024	25
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Bandung Tahun 2024.....	27
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penunjang Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	27
Tabel 3.4 Persentase capaian faktor risiko penyakit di pintu masuk dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan BKK Kelas I Bandung Semester I Tahun 2024.....	39
Tabel 3.5 Capaian Indikator	66
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Bandung Tahun 2020 s.d Juni 2024.....	67
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Indikator Kinerja	89
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung Semester I TA 2024 berdasarkan Output dan Sumber Dana	93
Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Sesuai Masing – Masing Indikator	94
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung Semester I TA 2024 berdasarkan Jenis Belanja	95
Tabel 3.11 Alokasi Anggaran dan Target Fisik Output Beserta Realisasi Anggaran dan Realisasi Output dari Masing-Masing Output pada DIPA Semester I Tahun 2024	96
Tabel 3.12 Perbandingan capaian realisasi anggaran BKK Kelas I Bandung Semester I Tahun 2023 dan 2024	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Revisi *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005 yang telah diratifikasi dan diberlakukan 15 Juni Tahun 2007 oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perhatian khusus terhadap *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global memberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan Persyaratan Kapasitas Inti bagi Bandara, Pelabuhan dan Perlintasan Darat.

Selanjutnya IHR 2005 mempersyaratkan agar pelabuhan, bandara dan perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya:

1. Menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontingensi emergensi kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya;
2. Melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan;
3. Menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka;
4. Menyediakan sarana diagnosis dan bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk;
5. Menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini;
6. Menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan dan menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, menetapkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut BKK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Isu strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Rendahnya pelaku perjalanan pada bandara kerjati

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati resmi dioperasikan secara penuh pada tanggal 29 Oktober 2023. Bandara ini melayani 1 (satu) rute penerbangan internasional yaitu kuala lumpur dan 3 (tiga) rute penerbangan domestik yaitu Bali, medan dan Balikpapan. Selain itu BIJB juga melayani penerbangan khusus seperti umroh dan haji untuk daerah Jawa Barat.

Dengan dioperasikannya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) diharapkan dapat meningkatkan trafik penerbangan menuju Jawa Barat dan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat. Namun dari data yang ada pada bulan Februari (dari 98.464 hanya 96.786), Maret (147.696 hanya 138.362) dan April (196.928 hanya 195.427) pengawasan pelaku perjalanan internasional tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya maskapai yang ada di Bandara Kertajati saat ini belum mengoperasikan banyak rute penerbangan bahkan beberapa maskapai yang sebelumnya pernah beroperasi di Bandara Husein Sastranegara belum membuka kembali penerbangan di Bandara Kertajati atau bahkan menutup rute penerbangan yang sebelumnya dibuka saat di Bandara Husein sehingga tidak banyak rute penerbangan yang dapat menjadi pilihan penumpang, sulit nya moda transportasi umum dari BIJB menuju dan ke daerah asal pelaku perjalanan menjadi salah satu hal yang membuat tidak banyak pelaku perjalanan menggunakan layanan jasa BIJB.

Hal ini akan berdampak pada kemungkinan menurunnya angka target dan capaian untuk memenuhi target indikator kinerja di tahun depan, karena di bulan November dan Desember yang merupakan musim puncak liburan natal dan tahun baru (nataru) jumlah penerbangan cenderung menurun. Dan capaian di tahun ini menjadi acuan dalam penentuan target capaian di tahun berikutnya.

2. Perubahan Organisasi BKK Bandung sesuai SE Perubahan Organisasi

Reformasi birokrasi yang terjadi di Kementerian Kesehatan dan di Balai Kekarantinaan Kesehatan ditandai dengan terbitnya Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan KepDirjen P2P Nomor HK.02.02/C/334/2024 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini berdampak

adanya perubahan di organisasi Kementerian dan balai kekarantinaan kesehatan, Kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengurangi jabatan struktural dan memperkaya jabatan fungsional ditandai dengan dilaksanakannya penyetaraan pejabat administrasi ke jabatan fungsional dan inpassing nasional jabatan fungsional.

Dengan adanya tim kerja baru di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dikarenakan adanya perubahan tugas dan anggaran yang sudah direncanakan di awal tahun menyesuaikan dengan jumlah tim kerja yang ada.

3. Pelabuhan Bandar Udara Sehat (PBUS)

Pelabuhan dan bandar udara sehat adalah suatu kondisi wilayah pelabuhan dan bandara yang bersih, aman, dan nyaman dan sehat untuk komunitas pekerja dan masyarakat pelabuhan dalam melakukan aktivitasnya. Tujuan dari penyelenggaraan pelabuhan dan bandara sehat adalah mewujudkan wilayah pelabuhan yang tidak menimbulkan risiko kesehatan masyarakat dan mewujudkan kondisi wilayah pelabuhan dan bandara yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk komunitas pekerja dan masyarakat. Setiap instansi dan badan usaha yang berada di lingkungan pelabuhan dan bandara bertanggung jawab menyelenggarakan pelabuhan sehat.

Penyelenggaraan pelabuhan dan bandara sehat diwujudkan melalui kegiatan yang terintegrasi meliputi : penyelenggaraan kesehatan lingkungan; penataan sarana fasilitas; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; dan peningkatan keamanan dan ketertiban. Untuk mendukung terselenggaranya pelabuhan sehat dibentuk forum pelabuhan sehat sebagai wadah bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan pelabuhan sehat. Forum pelabuhan dan bandara sehat terdiri atas unsur instansi terkait baik pusat maupun daerah yang membidangi Karantina, Imigrasi, Bea Cukai, pelaku usaha dan perwakilan asosiasi kemasyarakatan yang akuntabel berada di pelabuhan dan bandara.

Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengusulkan keikutsertaan Pelabuhan Perikanan dan Bandar udara dalam pelaksanaan apresiasi pelabuhan dan bandara sehat di tahun 2024. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati ditunjuk untuk ikut serta dalam pelaksanaan penghargaan pelabuhan dan bandar udara sehat Tahun 2024. Dimana kegiatan yang telah dilakukan adalah pembentukan forum bandara sehat di BIJB Kertajati, forum pelabuhan sehat di PPN Kejawanan Cirebon, Deklarasi Bebas Jentik Nyamuk di PPN Kejawanan Cirebon, dan juga telah dilakukan penilaian PBUS oleh tim verifikator dari Direktorat Jenderal Penyehatan

Lingkungan. Untuk hasil verifikasi PBUS antara Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dalam hal penetapan penerimaan penghargaan dengan SK Menkes akan diberikan pada acara Hari Kesehatan Nasional ke 60 Tahun 2024 di bulan November.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Guna mewujudkan misi Presiden Republik Indonesia dalam bidang kesehatan Tahun 2020 – 2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 6 (enam) tujuan strategis:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Untuk mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat menetapkan 4 (empat) tujuan:

1. Terwujudnya Pencegahan Penyakit yang komprehensif dan berkualitas
2. Terwujudnya Kab/ Kota Sehat

3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium Penyakit dan Faktor risiko diwilayah dan pintu masuk

4. Terbangunnya Tata Kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung memiliki tujuan strategis yaitu terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran strategis Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kekejarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.
2. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Balai Kekejarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berkedudukan di Provinsi Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung menggunakan anggaran dari APBN, untuk itu setiap tahun kita dituntut untuk melaporkan hasil kegiatan dan anggaran dalam bentuk laporan kinerja.

Laporan Kinerja ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2024 ini bertujuan untuk menjelaskan hasil analisis capaian program, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalahnya.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, BKK Kelas I Bandung mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKK Kelas I Bandung menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;
dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Adapun susunan organisasi BKK Kelas I Bandung terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi Umum.

Memiliki tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Kekearifan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien telah disusun tim kerja, yang terdiri dari :

- a. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekearifan Kesehatan.
- b. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang.
- c. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan.
- d. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang.
- e. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas.

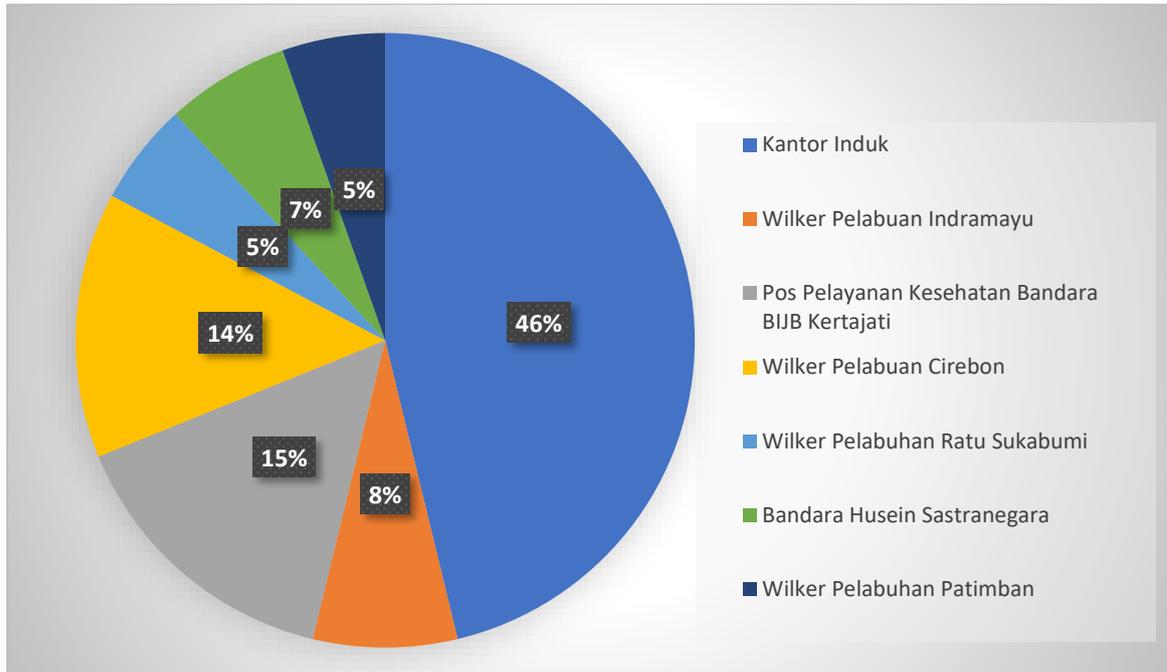
3. Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung, Wilker BKK merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKK. Di BKK Kelas I Bandung sendiri mempunyai 4 (empat) Wilayah Kerja Pelabuhan dan 2 (dua) Pos Kesehatan Bandar Udara yang terdiri dari :

- a. Wilker Pelabuhan Cirebon:
- b. Wilker Pelabuhan Indramayu
- c. Wilker Pelabuhan Patimban
- d. Wilker Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi
- e. Pos Kesehatan Bandara Husein Sastranegara Bandung
- f. Pos Kesehatan Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

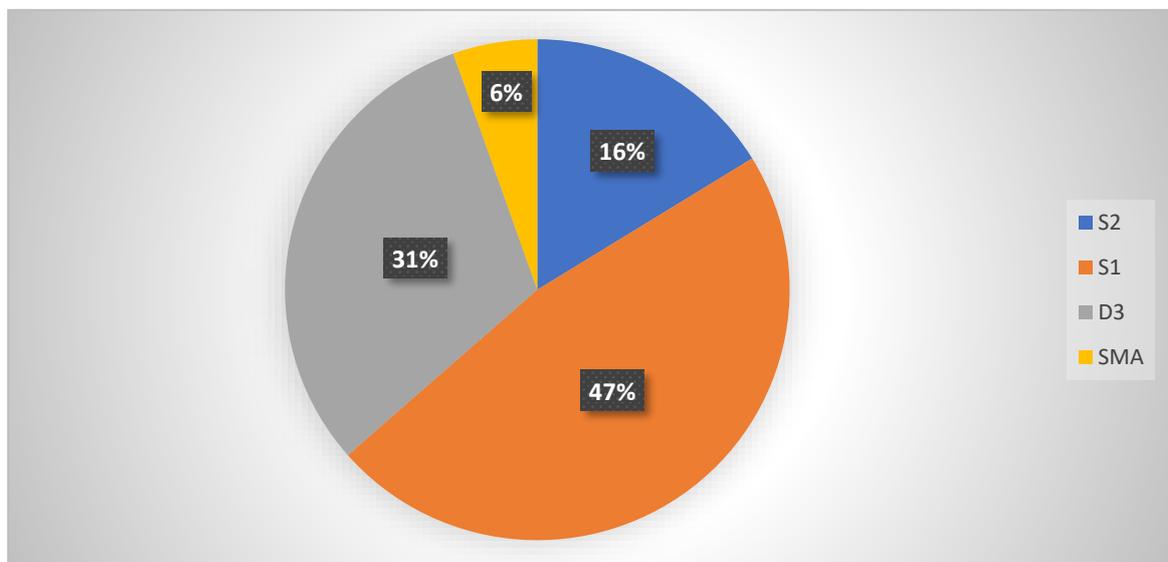
Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di BKK Kelas I Bandung diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Distribusi pegawai BKK Kelas I Bandung berdasarkan wilayah kerja, pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.1 Distribusi Pegawai di Lingkungan BKK Kelas I Bandung Tahun 2024



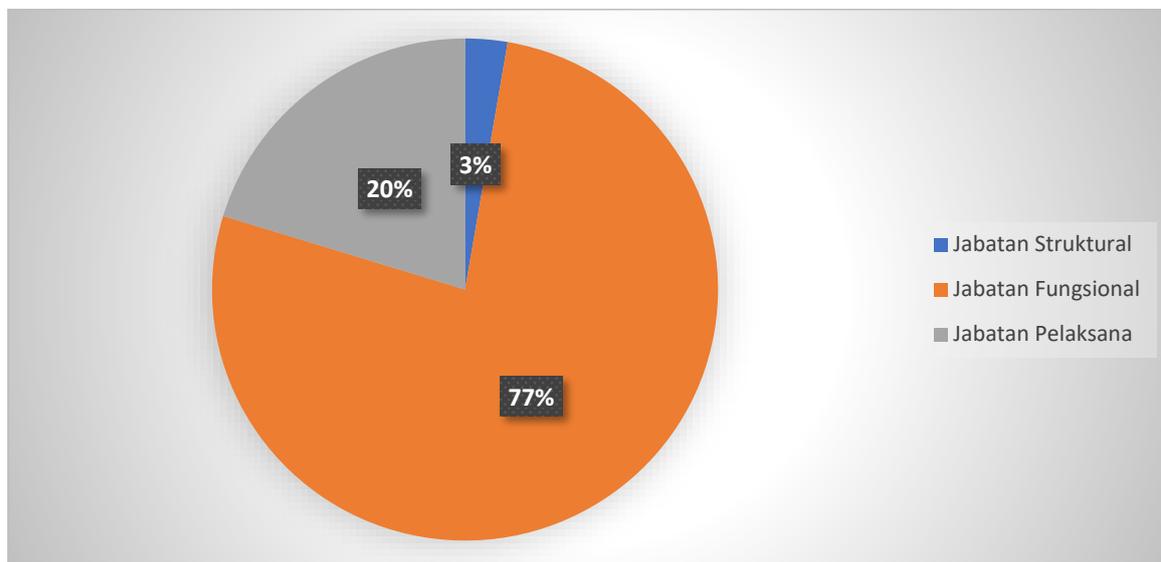
Jumlah Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BKK Kelas I Bandung sampai dengan 31 Juli 2024 adalah 71 orang PNS, 12 PPPK, dan 14 orang PPNPN sehingga total menjadi 97 orang yang tersebar baik di induk maupun wilayah kerja.

Grafik 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



ASN BKK Kelas I Bandung memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Berdasarkan kualifikasi jenjang pendidikan, pegawai BKK Kelas I Bandung didominasi oleh pegawai dengan jenjang pendidikan S1 (45.78%), D3 (33,73%), S2 (18.07%) dan SMA (2,40%).

Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024



Dari grafik diatas diketahui bahwa proporsi jabatan terbesar di BKK Kelas I Bandung adalah Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 68 orang (81.92%), dilanjutkan dengan Jabatan Pelaksana sebanyak 13 orang (15.66%) dan Jabatan Struktural sebanyak 2 orang (2.40%).

1. Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yaitu Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor dan Pejabat eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

2. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Dari 68 orang dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terdiri atas :

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JFT)	1
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (JFT)	1
4	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
5	Asisten Apoteker Terampil (JFT)	1
6	Dokter Ahli Madya (JFT)	2
7	Dokter Ahli Muda (JFT)	3
8	Dokter Ahli Pertama (JFT)	4
9	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	4
10	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
11	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
12	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	3
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	8
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
15	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
16	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	2
17	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	1
18	Perawat Mahir (JFT)	5
19	Perawat Penyelia (JFT)	2
20	Perawat Terampil (JFT)	5
21	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
22	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	1
23	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	1
24	Pranata Komputer Terampil (JFT)	1
25	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JFT)	2

26	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JFT)	1
27	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JFT)	1
28	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	1
29	Sanitarian Ahli Muda (JFT)	2
30	Sanitarian Mahir (JFT)	2
31	Sanitarian Penyelia (JFT)	1
32	Sanitarian Terampil (JFT)	2

3. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 13 orang dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) terdiri dari :

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU)	2
2	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JFU)	1
3	Bendahara (JFU)	1
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli (JFU)	2
5	Pembimbing Kesehatan Kerja / Analis Kesehatan Kerja (JFU)	1
6	Pengelola Barang Milik Negara (JFU)	1
7	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	2
8	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	1

9	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan (JFU)	1
10	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU)	1
11	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU)	2

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

1. Kata Pengantar

2. Ikhtisar Eksekutif

3. Daftar Isi

4. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang (berisi isu strategis di daerah), tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistematika penulisan

5. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap indikator dengan rincian yaitu analisis definisi operasional, rumus/cara perhitungan, capaian indikator, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan, kendala/masalah yang dihadapi, pemecahan masalah, efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

7. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

8. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja BKK Kelas I Bandung tahun 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020 – 2024, dan dalam kurun waktu tertentu target dari sasaran strategis dapat tercapai, melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bidang pencegahan masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas serta pengendalian dampak risiko lingkungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/2008).

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai hingga Tahun 2024 tersebut di atas, telah ditetapkan target kinerja setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Program BKK Kelas I Bandung Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah						
1	Jumlah pemeriksaan orang alat angkut, barang dan lingkungan	716.562	468.553	-	-	-
	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	-	-	0,94	0,95	0,95
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	98%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.	80%	90%	0,95	0,95	0,97
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	80	82
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	93	93	90	90
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	82	82	82
7	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%			
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	80%
8	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	-	-	-	-	95%
9	Persentase realisasi anggaran	-	-	-	95%	96%

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Memperkuat Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BKK tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut.
3. Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor.
4. Penggunaan teknologi informasi.

1.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN	0,95
			Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat, angkut, barang dan lingkungan	98%
			Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN	0.97
		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	82
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
			Kinerja implementasi WBK satker	82
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
			Presentase Rekomendasi Hasil	92,5%

			Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	
			Persentase realisasi anggaran	95%

Tabel 2. 3 Revisi Perjanjian Kinerja Revisi BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN	0,96
			Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat, angkut, barang dan lingkungan	98%
			Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN	0.97
		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	82
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
			Kinerja implementasi WBK satker	82
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
			Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%
			Persentase realisasi anggaran	96%

Pada Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.209.373.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

2.1 CAPAIAN KINERJA

Dilihat dari capaian masing-masing indikator output, untuk tahun 2024 BKK Kelas I Bandung dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sampai dengan akhir Juni 2024 pencapaian kinerja yang dari BKK Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKK Kelas I Bandung Semester I Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI
1	Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN	0,96	0,93	97%
		Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	98%	100%	102%
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan /Bandara/PLBN	0,97	1	103,09
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	82	42,27	51,55%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	94,39	100,42%
		Kinerja implementasi WBK satker	82	85,82	105%
		Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya	80%	60,98%	76,23%

		Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	100%	105,26
		Persentase realisasi anggaran	96%	46,64%	48,58%
Rata - Rata Capaian				87,68	

2.1.1 INDIKATOR PERTAMA

Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN

Adalah ukuran untuk menilai seberapa besar upaya deteksi faktor risiko penyakit yang telah dilakukan di Bandara/Pelabuhan/PLBN.

a. Definisi Operasional

Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun

b. Rumus/Cara Perhitungan

$$indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$$

S = score

S_{max} = score maksimal

S_{min} = score minimal

- Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage)
- Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max)
- Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)

Terdapat 4 parameter dimensi dasar perhitungan indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN yakni:

1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar
2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar
3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar
4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

c. Capaian Indikator

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN dilakukan melalui kegiatan pengawasan kekarantinaan dengan target dan capaian seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
	Target	Indeks	Realisasi	Indeks	
Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	0.96	Indeks	0,93	Indeks	97%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan untuk indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN sebesar 0,96 dengan realisasi sebesar 0,93 dengan capaian 97%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN belum melampaui dari target indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penunjang Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

Penunjang Indikator Kinerja	Target		Capaian		%
	Target	Indeks	Realisasi	Indeks	
Pemeriksaan Orang	299.262	Pemeriksaan	324.835	Pemeriksaan	108,55
Pemeriksaan Alat Angkut	3.084	Pemeriksaan	3.278	Pemeriksaan	106,29
Pemeriksaan Barang	1	Pemeriksaan	5	Pemeriksaan	166,67
Pemeriksaan Lingkungan	612	Pemeriksaan	705	Pemeriksaan	115,20
Total	302.959		328.823		108,54

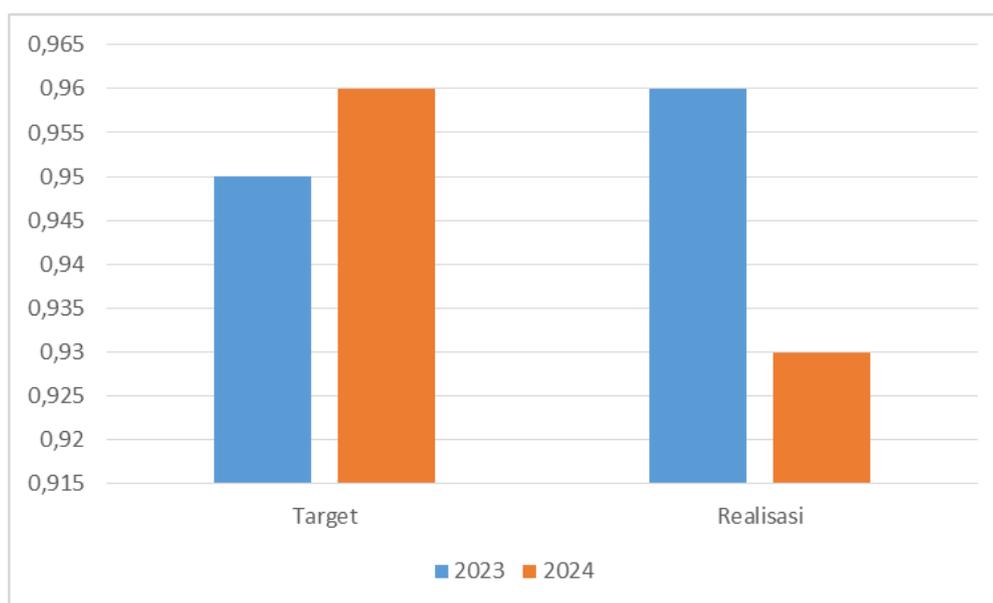
Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 kegiatan penunjang pada indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN yaitu pemeriksaan orang (pelaku perjalanan, kunjungan poliklinik bukan penumpang, skrining TB dan HIV AIDS, serta pemeriksaan penjamah makanan); pemeriksaan alat angkut (kapal dan pesawat); pemeriksaan barang (Sertifikat Izin Angkut Jenazah); serta pemeriksaan lingkungan di tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM), pemeriksaan sarana air bersih (SAB), pengawasan vektor meliputi vektor DBD, diare, dan pes.

Capaian indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN pada masing-masing indikator penunjang telah tercapai sesuai target yang direncanakan, dari target indikator sebesar 299.262 pemeriksaan tercapai sebesar 324.835 pemeriksaan (108,54%)

2. Perbandingan target dan realisasi beberapa tahun sebelumnya.

Pada indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan perhitungan menggunakan indeks baru diterapkan pada tahun 2023 sedangkan tahun-tahun sebelumnya menggunakan angka absolut. Perbandingan indeks indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 3.1 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara / Pelabuhan / PLBN BKK Kelas I Bandung Tahun 2023-2024

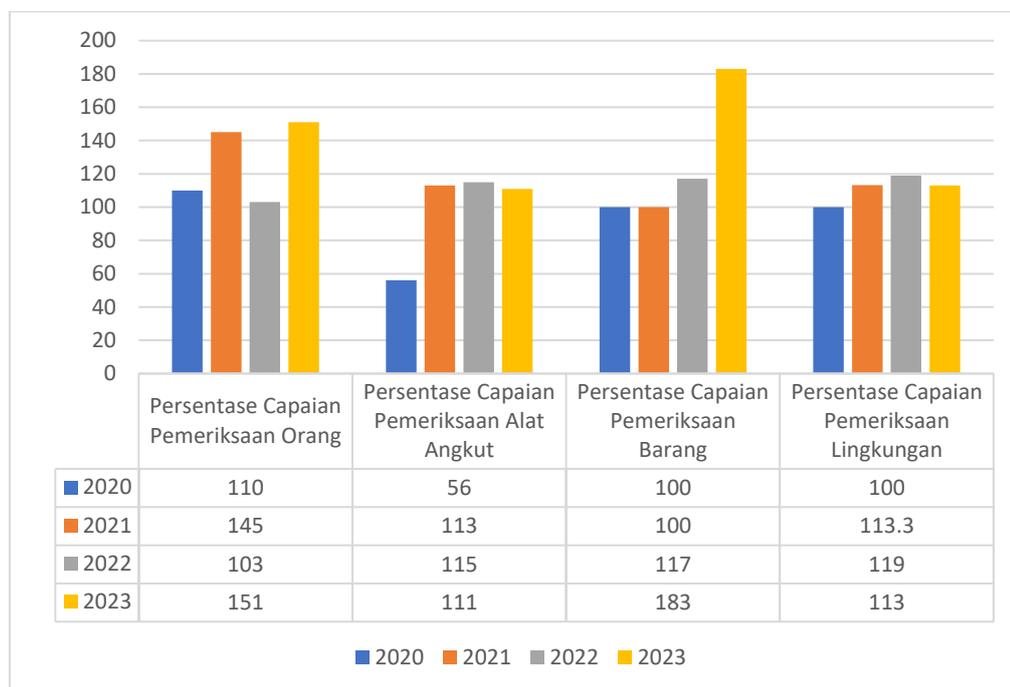


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan indeks target dan capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu juga jika dilihat dari angka absolut, capaian pemeriksaan pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023. Perbandingan parameter kegiatan indikator tahun 2020 – 2024 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara / Pelabuhan / PLBN Parameter Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan BKK Kelas I Bandung Semester I Tahun 2023-2024

Tahun	Pemeriksaan Orang		Pemeriksaan Alat Angkut		Pemeriksaan Barang		Pemeriksaan Lingkungan	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2023	350.550	529.696	2.621	3.018	6	1	551	635
2024	299.262	324.835	3.084	3.278	1	5	612	705

Grafik 3.3 Persentase Capaian Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 – 2024



Dari grafik dan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan persentase capaian parameter pemeriksaan orang tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu juga jika dilihat dari angka absolut capaian pemeriksaan orang terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 sudah masuk masa transisi dari pandemi ke endemi sehingga aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal. Dan ditambah juga pada bulan Juni 2024 status pandemi Covid-19 resmi dicabut/berakhir dan berubah status menjadi penyakit endemik di Indonesia. Sehingga terjadi peningkatan jumlah pelaku perjalanan serta ditambah dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 sudah dilaksanakan 100%.

Dari grafik di atas juga dapat dilihat bahwa persentase capaian parameter pemeriksaan alat angkut terjadi penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi jika dilihat dari angka absolut sudah mencapai target capaian, hal ini disebabkan adanya perubahan Definisi Operasional pada indikator 1 sehingga mengurangi sasaran alat angkut yang diperiksa dan menyebabkan juga target pemeriksaan alat angkut pada tahun 2024 turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian parameter pemeriksaan barang pada tahun 2021-2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Target ditetapkan berdasarkan tren capaian pemeriksaan barang (jenazah) pada tahun sebelumnya.

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian semester I tahun 2024 untuk parameter pemeriksaan lingkungan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target sebanyak 1.230 parameter lingkungan diperiksa sesuai dengan standar kekarantina kesehatan tercapai sebanyak 705 (57,32%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya target parameter pemeriksaan lingkungan pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan target terkait dengan operasional penerbangan dari di BIJB Kertajati Majalengka yang mulai aktif dan mempengaruhi jumlah kunjungan, sehingga jumlah TTU dan TPM yang dilakukan pengawasan bertambah.

3. Perbandingan dengan target jangka menengah

Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah 2020 - 2024, baru dapat dibandingkan mulai Tahun 2023, karena merupakan tahun pertama setelah perubahan nomenklatur indikator kinerja. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target jangka menengah hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN dengan Target Jangka Menengah

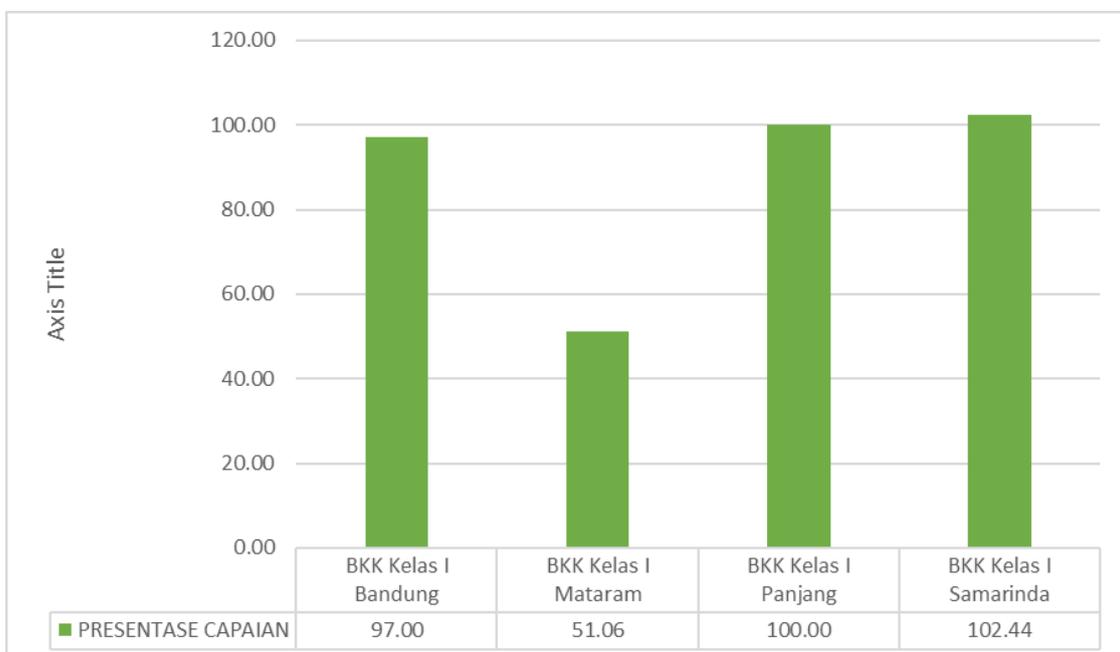


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN pada semester 1 Tahun 2024 sebesar 0.93, belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun ini yaitu sebesar 0,96. Apabila dibandingkan dengan jangka akhir tahun 2024 sebesar 0.96 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, maka capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa belum mencapai target jangka menengah. Diperlukan upaya yang konsisten agar pencapaian target untuk tahun 2024 sebesar 0.96 dapat tercapai sesuai dengan proyeksi realisasi sebesar 0.96 dengan terus meningkatkan kemampuan BKK Kelas I Bandung dalam mendeteksi faktor risiko di pintu masuk negara, meningkatkan kewaspadaan dan menjalin jejaring kerja di lingkungan pelabuhan.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis/setara

Perbandingan persentase capaian indikator kinerja indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN, BKK Kelas I Bandung dibandingkan dengan satker lain yang sejenis yaitu capaian BKK Kelas I Panjang, BKK Kelas I Mataram, dan BKK Kelas I Samarinda dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN dengan BKK Sejenis Pada Semester I Tahun 2024



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa di antara keempat satker, persentase capaian indikator kinerja indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN tahun 2024 yang paling tinggi berturut-turut yaitu BKK Kelas I Samarinda dari target 0.94 telah

tercapai 0.96 (102,44%), BKK Kelas II Panjang dari target 0.95 telah tercapai 0.95 (100%), disusul oleh BKK Kelas I Bandung dari target 0.96 telah tercapai 0.93 dan yang terakhir yaitu BKK Kelas II Mataram dari target 0.94 telah tercapai 0.48 (51,06%). Secara garis besar mayoritas satker tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tertinggi adalah BKK Panjang dan capaian kinerja terendah adalah BKK Mataram.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian indikator kinerja Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN pada tahun 2024 tercapai sebesar 108,54% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh:

- a. Telah disahkannya UU Karantina Tahun 2018 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
- b. Ketersediaan SDM yang kompeten sesuai bidangnya dan didukung dengan peralatan yang ada serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program di wilayah pelabuhan dalam pengawasan dan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan.
- c. Dukungan SDM yang terdiri dari petugas dan atau kader yang berperan aktif dalam kegiatan pemeriksaan lingkungan dan pengendalian vektor dan BPP.
- d. Dukungan anggaran kegiatan pemeriksaan tempat pengelolaan pangan dan layanan survei dan pengendalian vektor dan BPP.
- e. Dukungan alat dan bahan pemeriksaan lingkungan serta survei dan pengendalian vektor dan BPP.
- f. Dukungan dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor baik di pelabuhan maupun bandara dan wilayah

6. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Adapun upaya yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tercapainya indikator Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Orang

1) Pemeriksaan Pelaku Perjalanan

Pemeriksaan pelaku perjalanan dilakukan kepada seluruh penumpang dan kru pesawat serta kapal yang datang dan berangkat. Pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan suhu tubuh menggunakan *thermal scan* untuk penumpang dan kru pesawat dan *thermometer* untuk penumpang dan kru kapal. Selain itu juga dilakukan upaya kewaspadaan melalui pengawasan *Health Alert Card* yang

merupakan alat kontrol yang dapat menggambarkan riwayat perjalanan pada pelaku perjalanan. Pengawasan ini bertujuan untuk cegah tangkal penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaku perjalanan. Petugas BKK Kelas I Bandung juga melakukan pengawasan pada Jemaah umroh dan haji. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait juga dilakukan terkait program dalam rangka pemeriksaan orang. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain

2) Pelayanan Kesehatan Haji

Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji pada masa Embarkasi dan Debarkasi sebagai upaya pengendalian kekarantina kesehatan berjalan secara optimal dengan melibatkan berbagai lintas sektor dan program terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelayanan kesehatan pra embarkasi, embarkasi dan debarkasi serta pasca debarkasi. Petugas BKK Kelas I Bandung juga melakukan pengawasan pada Jemaah umroh. Kegiatan ini didukung oleh anggaran pada DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2024.

3) Pengawasan Pelayanan Vaksinasi Internasional (Meningitis dan Yellow Fever)

Setiap orang yang melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian vaksinasi tersebut dilakukan di Balai Karantina Kesehatan seluruh Indonesia dan Rumah sakit / Klinik yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Setelah dilakukan vaksinasi maka dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi internasional (ICV).

4) Skrining Penyakit Menular Langsung (PML)

Kegiatan skrining TB dan HIV/AIDS dilakukan di wilayah kerja BKK Kelas I Bandung yaitu pada masyarakat pelabuhan sebagai bentuk skrining dan pengawasan terhadap penyakit TB dan HIV/AIDS di wilayah pelabuhan/ bandara. Selain itu juga dilakukan koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan skrining TB dan HIV/AIDS, menyediakan peralatan dan bahan penunjang medis yang memadai

5) Penjamah makanan

Penjamah makanan yang diawasi di lingkungan bandara dan pelabuhan adalah merupakan penjamah makanan yang bekerja di TPM yang berada di lingkungan bandara dan pelabuhan, serta penjamah makanan di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi dan Embarkasi Indramayu Kertajati pada saat operasional haji.

b. Pemeriksaan Alat Angkut

Pemeriksaan pada alat angkut adalah pemeriksaan alat angkut (kapal dan pesawat) di wilayah kerja BKK Kelas I Bandung yang dilakukan selama satu tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dijelaskan bahwa dalam rangka kewaspadaan wabah di pintu masuk dan perlintasan antardaerah, pemerintah pusat melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, baik di pintu masuk maupun pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik. Dalam PP No. 28 Tahun 2024 dijelaskan bahwa pengawasan alat angkut pada saat kedatangan dari luar negeri atau daerah terjangkau. Selain dari wilayah tersebut pengawasan dapat dilakukan secara acak. Nahkoda kapal hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang setelah dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan oleh pejabat kekarantinaan kesehatan. Sebelum keberangkatan kapal juga akan dilakukan pemeriksaan faktor resiko kesehatan terhadap kapal tersebut sebagai dasar dalam penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*. Pemeriksaan *Health Part of General Declaration (Gendec)* merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh *purser/pilot*, berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/*crew* yang membawa penyakit menular. Pemeriksaan dilakukan dengan cara boarding ke pesawat yang datang dari Luar Negeri atau dengan mengamati *Gendec* yang didapat dari *Ground Handling*. Koordinasi dilakukan dengan lintas sektor terkait di pelabuhan/bandara dalam penerapan kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk.

c. Pemeriksaan Barang

Dilakukan pemeriksaan pada jenazah, dokumen pendukung, dan pengemasan peti jenazah yang akan diberangkatkan menggunakan alat angkut pesawat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan layak maka dapat dilakukan penerbitan surat izin angkut jenazah. Selain itu juga dilakukan pengawasan pada kedatangan barang berupa jenazah/abu jenazah melalui dokumen jenazah yang dibawa dari wilayah asal.

d. Pemeriksaan Lingkungan

Pemeriksaan lingkungan adalah kegiatan pengawasan terhadap parameter lingkungan yang dilakukan untuk mengetahui faktor risiko pada lingkungan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan terkait pemeriksaan lingkungan di BKK Kelas I Bandung yaitu sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Bangunan Umum (HSBU)

Kegiatan yang dilakukan adalah inspeksi HSBU pada tempat-tempat umum (TTU) yang dilakukan secara berkala minimal 3 kali dalam 1 tahun. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan TTU yang ada di lingkungan pelabuhan/ bandara sesuai dengan standar kekarantina kesehatan. Parameter yang diperiksa adalah meliputi fisik bangunan, kebisingan, pencahayaan, air bersih, keberadaan vektor, sampah dan lain – lain.

2) Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan inspeksi hygiene sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) yang ada di lingkungan pelabuhan/ bandara yang dilakukan secara rutin. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang laik hygiene di lingkungan pelabuhan dan bandara. Parameter yang diperiksa adalah lokasi dan fisik bangunan, fasilitas sanitasi, dapur, ruang makan, bahan makanan, makanan jadi, proses pengolahan makanan, peralatan masak maupun makan yang digunakan sampai dengan penjamah makanannya. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksaan laboratorium pada makanan minuman, alat makan/ alat memasak maupun kesehatan penjamahnya yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

3) Pemeriksaan Sarana Penyediaan Air Bersih (SAB)

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan inspeksi pada sarana penyediaan air bersih secara rutin setiap bulan dan melakukan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis sebagai upaya yang dilakukan untuk memeriksa bahwa sarana penyediaan air bersih (SAB) dan kualitas air bersih yang digunakan di bandara/pelabuhan memenuhi syarat.

4) Pemeriksaan/ Survey Vektor DBD (*Aedes aegypti*).

Kegiatan survey vektor DBD dilakukan rutin setiap bulan sebagai upaya untuk memantau bahwa pelabuhan/ bandara angka HI (House Indeks) Perimeter = 0 dan HI buffer ≤ 1 . Dilakukan dengan melakukan survei jentik *Aedes* spp. secara rutin setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

Pemeriksaan/ Survey Vektor Diare (Kecoa dan Lalat)

Kegiatan survey vektor diare (Kecoa dan Lalat) dilakukan rutin setiap bulan sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepadatan kecoa dan lalat memenuhi standar baku mutu (< 2) di pelabuhan/ bandara yang dilakukan pengawasan.

5) Pemeriksaan/ Survey Vektor Pes (Tikus dan Pinjal)

Kegiatan survey tikus dan pinjal dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa indeks pinjal di pelabuhan/bandara ≤ 1 . Kegiatan yang dilakukan yaitu pemasangan perangkap tikus secara rutin yaitu setiap 40 hari sekali berdasarkan siklus hidup tikus.

7. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Kendala/Permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Orang

- 1) Jumlah jamaah umroh yang melakukan vaksinasi meningitis sudah meningkat dari tahun sebelumnya tetapi banyak ditemukan jamaah dengan komorbid yang tidak terkontrol sehingga terjadi penundaan vaksinasi dan tidak kunjung datang kembali. Sehingga jamaah umroh tidak ada perlindungan sedangkan cegah tangkal penyakit harus tetap dilakukan.
- 2) Pegawai di sekitar pelabuhan dan bandara sudah memanfaatkan BKK Bandung sebagai fasilitas kesehatan pengobatan, hanya pengobatan tidak bisa dilakukan maksimal karena keterbatasan jenis obat yang ada di poliklinik.
- 3) Ditemukannya pasien dengan faktor risiko pada pelayanan pemeriksaan skrining TB/HIV

b. Pemeriksaan Alat angkut

Masih terjadi gangguan dalam akses Sinkarkes sehingga pelayanan penerbitan sertifikat kapal sedikit terhambat.

c. Pemeriksaan Barang

Dikarenakan pemeriksaan barang adalah jenazah maka tidak ada permasalahan.

d. Pemeriksaan Lingkungan

Kendala yang ditemukan pada parameter pemeriksaan lingkungan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Masih ditemukan tempat pengelolaan makanan (TPM) yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak sesuai dengan standar kekarantina kesehatan
- 2) Masih ditemukan sarana penyediaan air bersih (SAB) yang hasil pemeriksaan bakteriologisnya dinyatakan tidak memenuhi syarat
- 3) Masih ditemukan pelabuhan/bandara yang hasil survey vektor DBDnya dinyatakan tidak memenuhi syarat
- 4) Masih ditemukan pelabuhan/bandara yang hasil survey vektor diarenya (kecoa dan lalat) dinyatakan tidak memenuhi syarat

Pemecahan masalah yang dilakukan yaitu :

a. Pemeriksaan Orang

- 1) Tetap merekomendasikan vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi jamaah umroh terutama bagi calon Jemaah yang memiliki penyakit komorbid sebagai perlindungan diri. Membuat himbauan melalui media sosial sebagai edukasi kepada masyarakat. Serta berkoordinasi dengan dinas kesehatan kab/kota jika ada laporan kasus meningitis.
- 2) Berkoordinasi dengan dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mengingatkan calon Jemaah haji untuk membawa semua dokumen Kesehatan yang dipersyaratkan agar mengefektifkan dan mengefisienkan waktu pemeriksaan. Menyampaikan permasalahan yang ditemukan tentang ketidaksesuaian kondisi Jemaah kepada dinas Kesehatan, dan terus melakukan pemantauan kondisi Jemaah. Berkoordinasi secara terus menerus dengan PPIH Embarkasi JKS untuk mendapatkan informasi perubahan Jemaah.
- 3) Berkoordinasi dengan dinas Kesehatan kabupaten/kota atau puskesmas setempat untuk menindaklanjuti pasien dengan faktor risiko dari hasil kegiatan skrining TB/HIV

b. Pemeriksaan Alat Angkut

Menyiapkan dokumen generate agar tidak menghambat pelayanan penerbitan sertifikat kesehatan kapal

c. Pemeriksaan Barang

Tidak ada pemecahan masalah

d. Pemeriksaan Lingkungan

Pemecahan masalah yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti permasalahan pada parameter pemeriksaan lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab TPM yang hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat serta melakukan pendampingan secara berkelanjutan
- 2) Melakukan tindakan pengolahan air lanjutan pada SAB yang hasil bakteriologisnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dapat berupa penambahan kaporit maupun pengelolaan lanjutan (disinfeksi) dengan bahan lainnya. Melakukan pemeriksaan air bersih dilakukan setelah pengendalian.
- 3) Melakukan kegiatan pengendalian vektor DBD diantaranya dengan PSN 3M Plus, larvasidasi dan/atau fogging.
- 4) Melakukan kegiatan pengendalian vektor diare (kecoa dan lalat) dengan melakukan perbaikan sanitasi lingkungan, penggunaan lem lalat/kecoa, spraying dan/atau penggunaan lem berinsektisida.

2.1.2 INDIKATOR KEDUA

Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat, angkut, barang dan lingkungan adalah pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang telah dilakukan pemeriksaan di pintu masuk. Angka ini menggambarkan besaran faktor risiko yang telah ditemukan dari hasil pemeriksaan dan telah dilakukan tindakan pengendalian.

a. Definisi Operasional

Status Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun

b. Rumus/Cara Perhitungan

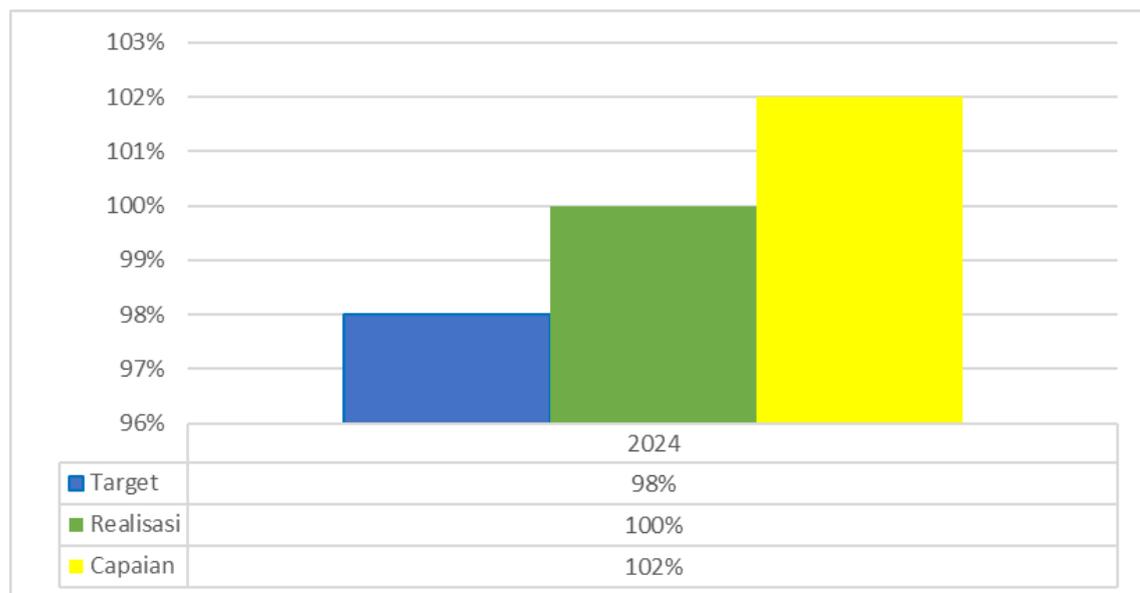
Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

c. Capaian Indikator

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Jumlah realisasi Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat, angkut, barang dan lingkungan pada BKK Kelas I Bandung pada semester I tahun 2024 yaitu 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 98% sehingga capaian kinerja sebesar %.

Grafik 3.6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan



Adapun komponen yang mendukung indikator Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun

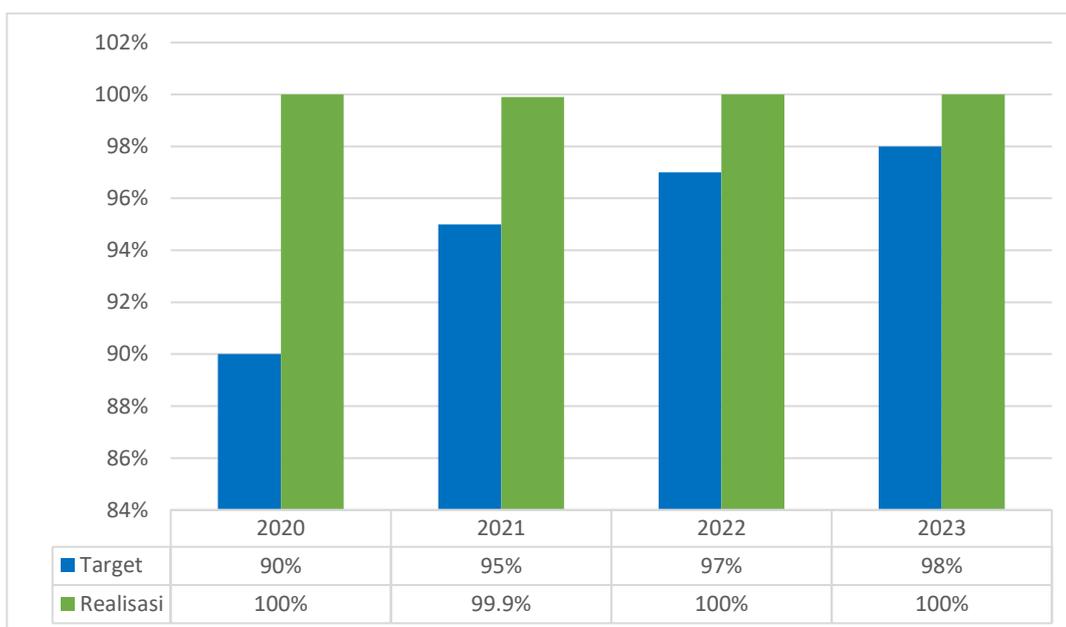
2024 yaitu Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang sebanyak 2.540 orang dan yang dikendalikan sebanyak 2.540 orang, Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan alat angkut sebanyak kapal dan yang dikendalikan sebanyak , tidak ditemukan faktor risiko pada pemeriksaan barang, dan Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan lingkungan sebanyak titik/lokasi dan dikendalikan titik/lokasi, sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Persentase capaian faktor risiko penyakit di pintu masuk dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan BKK Kelas I Bandung Semester I Tahun 2024

Faktor Resiko	Jumlah FR yang Ditemukan	Jumlah FR yang Dikendalikan	Realisasi (%)
Pemeriksaan Orang	2.540	2.540	100
Pemeriksaan alat angkut	2	2	100
Pemeriksaan Barang	0	0	-
Pemeriksaan Lingkungan	170	170	100

2. Perbandingan target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.
Perbandingan target dengan capaian kinerja indikator persentase faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2020 dengan tahun 2023 disajikan pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.7 Perbandingan Indikator Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Tahun 2023 dengan Tahun 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian pengendalian faktor risiko pada orang pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena status Covid-19 sudah ditiadakan sehingga pelaku perjalanan meningkat, vaksinasi meningitis dan yellow fever yang meningkat dari tahun sebelumnya, serta adanya kuota tambahan pada haji. Pengendalian faktor risiko pada alat angkut juga mengalami realisasi sebesar 100% dikarenakan berakhirnya pandemi covid-19. Dilakukan pengendalian faktor risiko pada barang (jenazah) berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diajukan tetapi tidak ada jenazah yang akibat penyakit menular/potensial wabah. Pengendalian faktor risiko pada lingkungan dilakukan pada 100 % faktor risiko lingkungan yang ditemukan, hal ini didukung dengan adanya SDM yang kompeten sesuai dengan bidangnya, adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor serta adanya program pengendalian faktor risiko lingkungan yang dianggarkan pada DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2024.

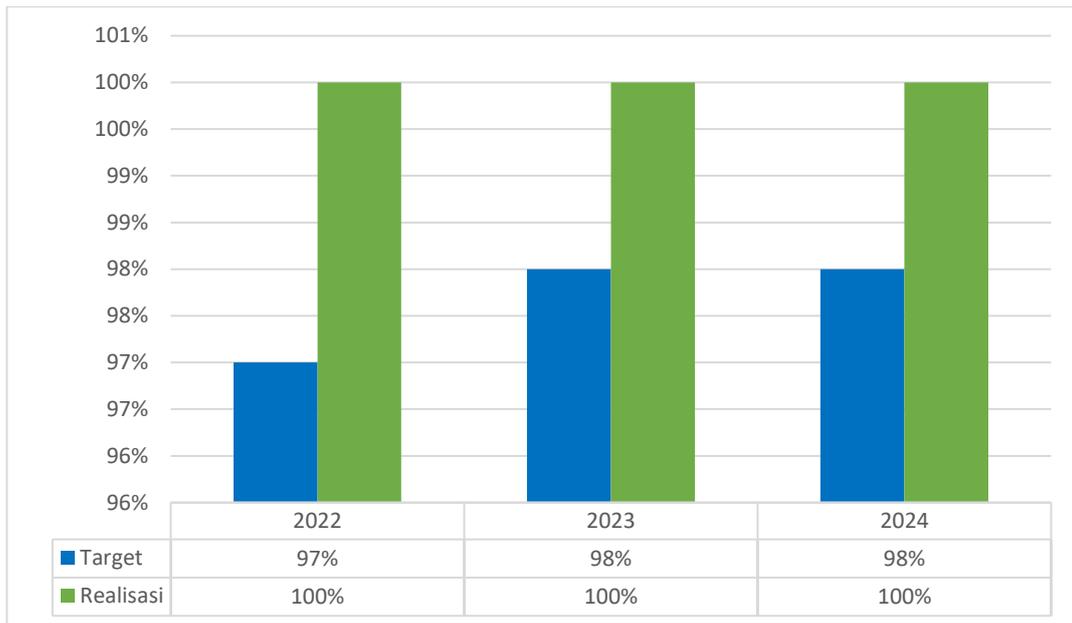
3. Perbandingan dengan target Nasional (Renstra/RAP/Permenkes)

Capaian kinerja indikator persentase pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk pada tahun 2024 dibandingkan dengan nilai standar nasional kementerian kesehatan tahun 2024, diketahui bahwa capaian persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan jika dibandingkan dengan target standar nasional sebesar 97% sudah melebihi target yang ditentukan. Peningkatan ini disebabkan karena persentase faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu masuk di BKK Bandung telah melebihi target yaitu sebanyak 100% dari target 98%, baik pengendalian terhadap orang, alat angkut, barang maupun lingkungan.

4. Perbandingan dengan target jangka menengah

Capaian kinerja indikator persentase pengendalian faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2024 dibandingkan dengan target capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.8 Capaian Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Tahun 2020 – 2024

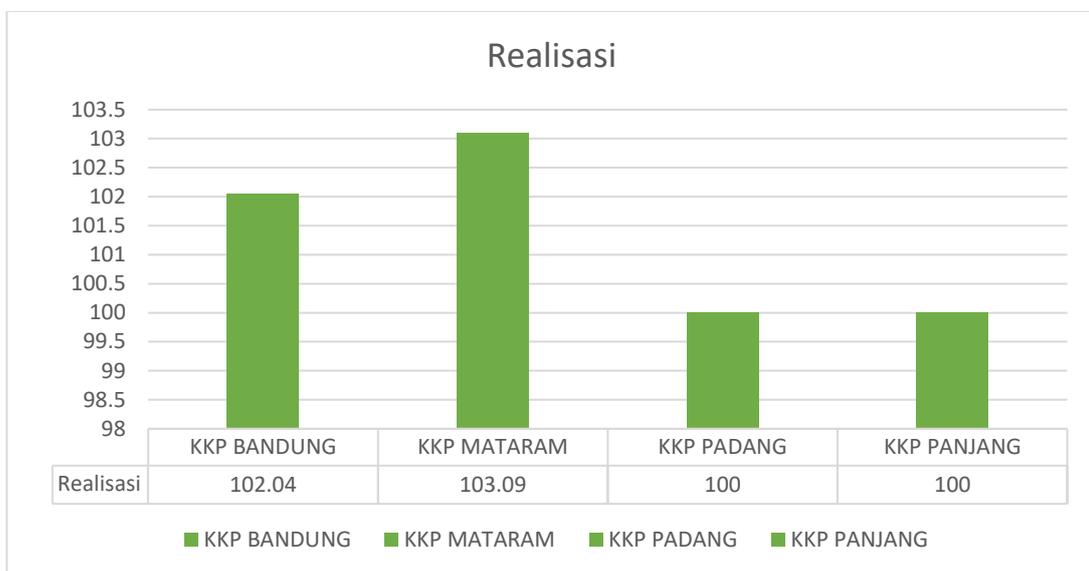


Dari grafik di atas diketahui bahwa capaian persentase faktor risiko penyakit yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2023 telah melebihi target kinerja sebesar 100% dari target yang direncanakan sebesar 97%, begitu juga dengan capaian tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 98% dan jika dibandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah tahun 2023 sampai dengan 2024 pun capaian kinerja persentase pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk negara pada tahun ini sudah memenuhi target. Berdasarkan perhitungan persentase peningkatan target dan capaian tahun sebelumnya, maka 2024 ditentukan sebesar 98%. Berdasarkan trend capaian tahun 2023 dan 2024 diharapkan capaian 2024 dapat tercapai sebesar 100%. Semua wilker sudah dilengkapi dengan fasilitas pengendalian, sebagian besar faktor risiko ditemukan pada orang saat kegiatan haji yaitu sebesar 3.363 dari 5.032 faktor risiko (67%). Pada saat kegiatan haji seluruh pelayanan kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan daerah setempat sehingga terdapat bantuan sumber daya baik berupa tenaga, sarana dan koordinasi dengan rumah sakit rujukan. Pengendalian faktor risiko pada alat angkut juga mengalami realisasi sebesar 100% dikarenakan aktifitas masyarakat mulai meningkat setelah berakhirnya pandemic covid-19. Pengendalian faktor risiko pada barang (jenazah) dilakukan berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diajukan. Pengendalian faktor risiko pada lingkungan dilakukan pada 100 % faktor risiko lingkungan yang ditemukan, hal ini didukung dengan adanya SDM yang kompeten sesuai dengan bidangnya, adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor serta adanya program

pengendalian faktor risiko lingkungan yang dianggarkan pada DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2024.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis/setara
Persentase capaian persentase faktor risiko penyakit yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, BKK Kelas I Bandung dibandingkan dengan capaian BKK Kelas II Mataram, BKK Kelas II Padang, dan BKK Kelas II Panjang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Faktor Risiko yang dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan KKP Sejenis Pada Tahun 2024



Pada grafik diatas terlihat bahwa BKK Kelas I Bandung dari target 98% telah tercapai 100% (102,04%), BKK Kelas II Mataram dari target 97% telah tercapai 100% (103,09%), BKK Kelas II Padang dari target 100% telah tercapai 100% (100%), dan BKK Kelas II Panjang dari target 100% telah tercapai 100% (100%). Untuk indikator ini dapat disimpulkan bahwa seluruh BKK pada grafik diatas telah mencapai target yang ditentukan.

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian indikator kinerja persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2024 tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98%. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh:

- a. Koordinasi dan sosialisasi yang lebih baik dengan lintas program dan lintas sektor membuat masyarakat dan pegawai pelabuhan dan bandara semakin menyadari pentingnya kesehatan sehingga capaian sasaran melebihi target yang ditentukan.
- b. Sumber daya manusia yang terdiri dari petugas dan atau kader yang berperan aktif dalam kegiatan pengendalian faktor risiko sehingga faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dapat dikendalikan secara maksimal.
- c. Meskipun adanya efisiensi anggaran yang disebabkan berkurangnya anggaran yang berasal dari PNBPN yang diakibatkan oleh berkurangnya kunjungan vaksinasi tetapi pencapaian indikator kinerja persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dapat tercapai.
- d. Dukungan alat dan bahan juga menjadi salah satu faktor meningkatnya capaian indikator kinerja persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
- e. Maksimalnya kinerja sumber daya manusia juga tidak terlepas dari peningkatan kapasitas SDM BKK Kelas I Bandung dalam mengikuti pelatihan dan pembelajaran sesuai dengan kompetensinya
- f. meningkatnya dan peralatan yang ada serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program di wilayah pelabuhan kinerja persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
- g. Di tahun 2024, pelaksanaan haji di Jawa Barat dilaksanakan di 2 embarkasi, sehingga BKK Bandung membutuhkan SDM yg lebih banyak. Kekurangan itu didukung oleh penambahan SDM dari Dinkes Kab Kota sehingga pelaksanaan haji tahun 2024 tetap bisa terlaksana dengan baik. Dengan harapan di tahun depan pelaksanaan haji direncanakan lebih baik dengan SDM yang sesuai dan anggaran yang sesuai.

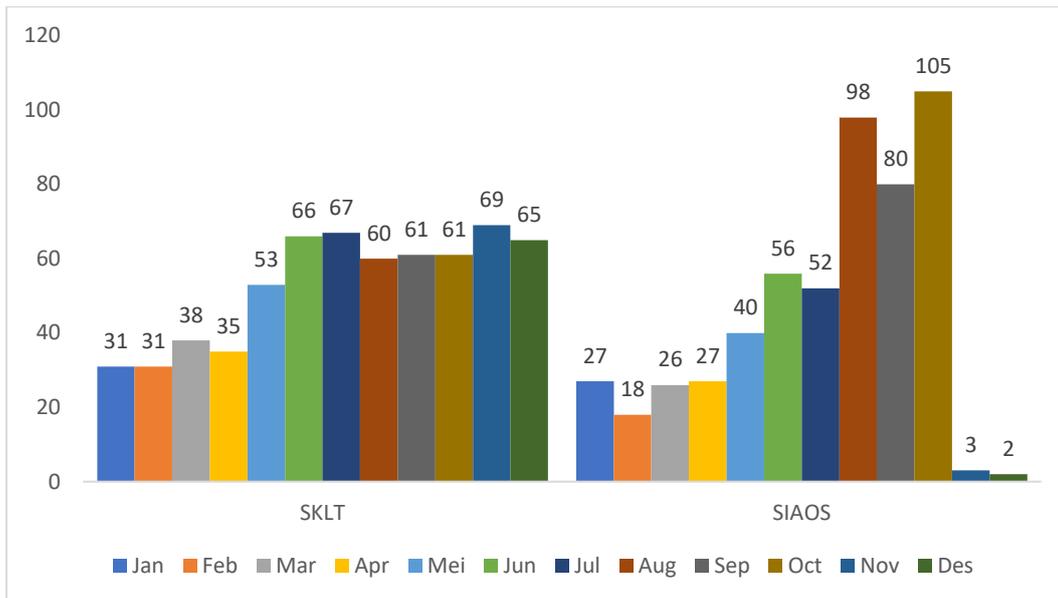
7. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Adapun upaya untuk menunjang pencapaian indikator deteksi faktor risiko di pintu masuk negara adalah sebagai berikut:

- a. Faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada orang

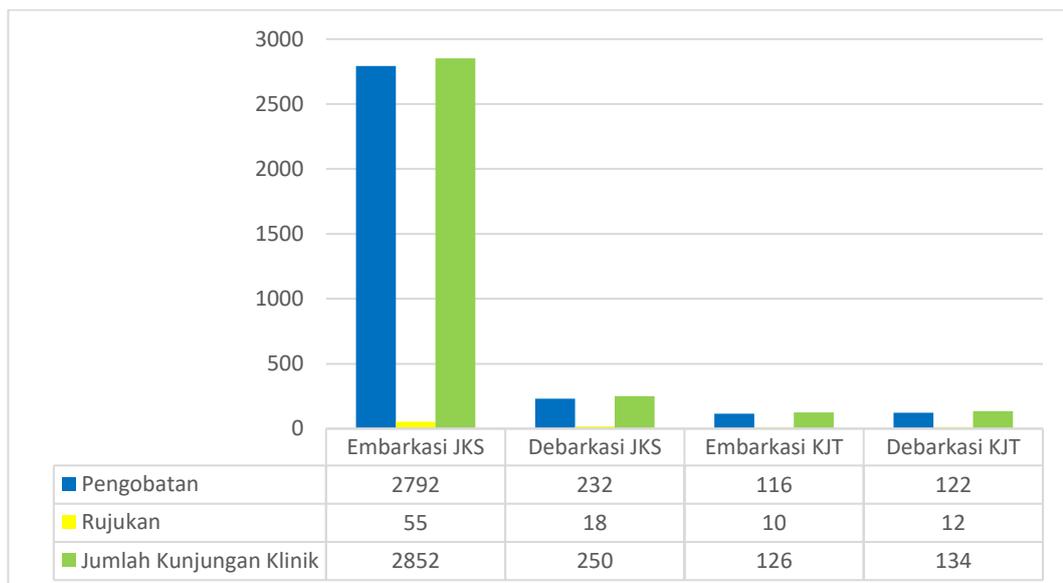
Adapun kebijakan dan upaya yang dilaksanakan terkait dengan faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan secara rutin setiap bulan dari seluruh wilayah kerja di BKK Kelas I Bandung dengan beberapa Sub indikator yang dilakukan diantaranya:

Grafik 3.10 Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Terbang dan Sertifikat Ijin Angkut Orang Sakit



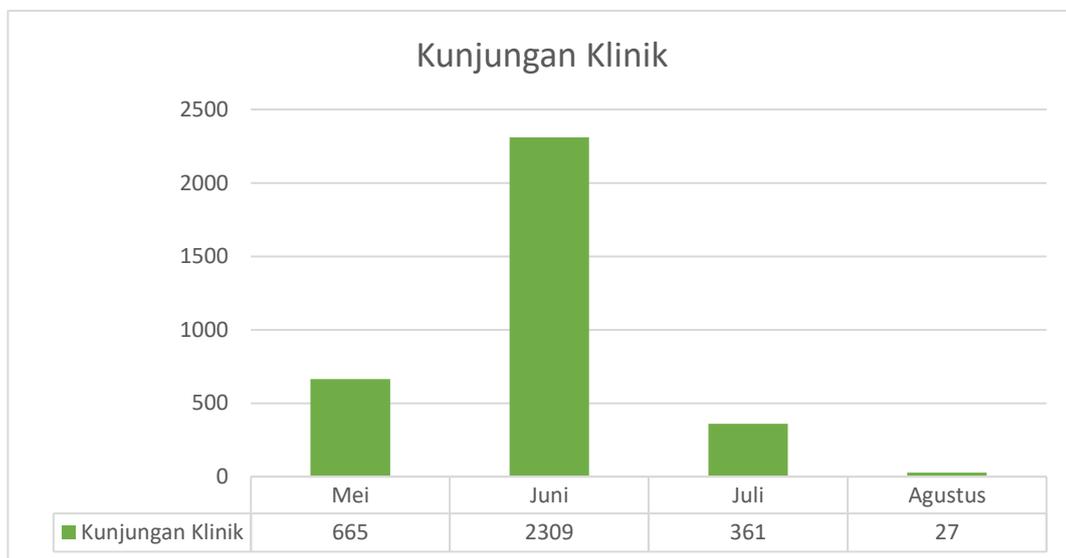
Faktor risiko yang dikendalikan pada penumpang pesawat yaitu Penerbitan sertifikat ijin laik terbang sebanyak 407 sertifikat laik terbang, 37 sertifikat tidak laik terbang dan penerbitan sertifikat ijin angkut orang sakit sebanyak 8 sertifikat yang dilakukan di Pos Bandara Husein Sastranegara dan Wilker Bandara Internasional Kertajati secara rutin di setiap penerbangan dan dilaporkan setiap kali ditemukan kasus. Kegiatan pelaporan dilakukan setiap hari melalui aplikasi Sinkarkes dan direkap setiap bulan.

Grafik 3.11 Jumlah Faktor risiko yang dikendalikan pada Jamaah haji yang sakit



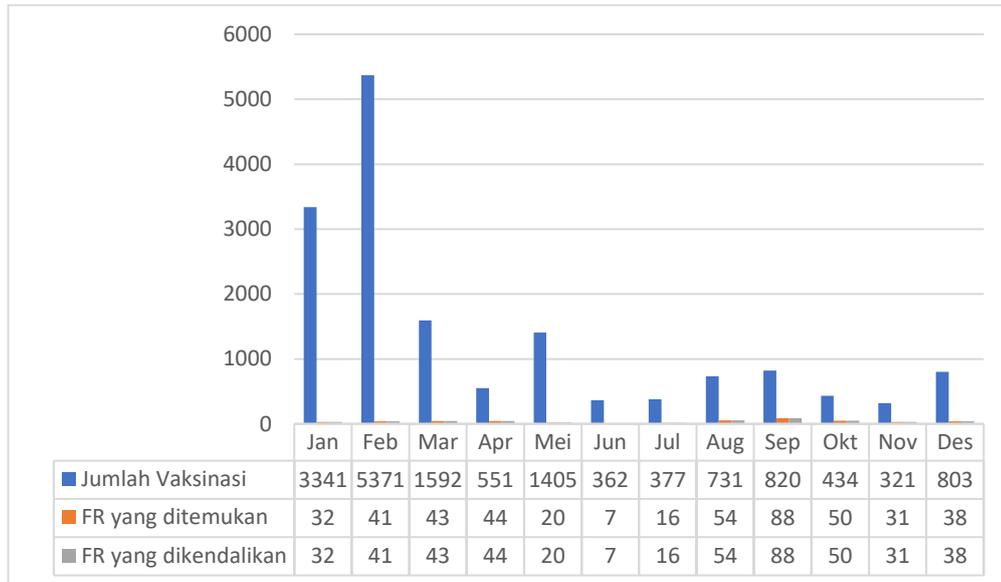
Faktor risiko yang dikendalikan pada Jamaah haji yang sakit yang diberikan penanganan di poliklinik embarkasi dan debarkasi haji kloter provinsi Jawa Barat. Total jumlah kunjungan . Jumlah Kunjungan poliklinik Embarkasi JKS Bekasi sebanyak 1.344 jamaah terdiri 1.304 melakukan pengobatan dan 40 rujukan diantaranya 23 jamaah dengan SKLT, 17 jamaah dengan SKTLT. Jumlah kunjungan Debarkasi JKS Bekasi sebanyak 25 jamaah terdiri dari 20 jamaah dengan pengobatan dan 5 jamaah yang dirujuk. Jumlah kunjungan poliklinik Embarkasi Kertajati sebanyak 355 jamaah terdiri 337 melakukan pengobatan dan 18 rujukan diantaranya 7 jamaah dengan SKLT, 11 jamaah dengan SKTLT. Jumlah kunjungan poliklinik Debarkasi Kertajati sebanyak 30 jamaah terdiri dari 27 jamaah dengan pengobatan dan 3 jamaah yang dirujuk.

Grafik 3.12 Jumlah Kunjungan poliklinik Embarkasi/Debarkasi perbulan tahun 2023



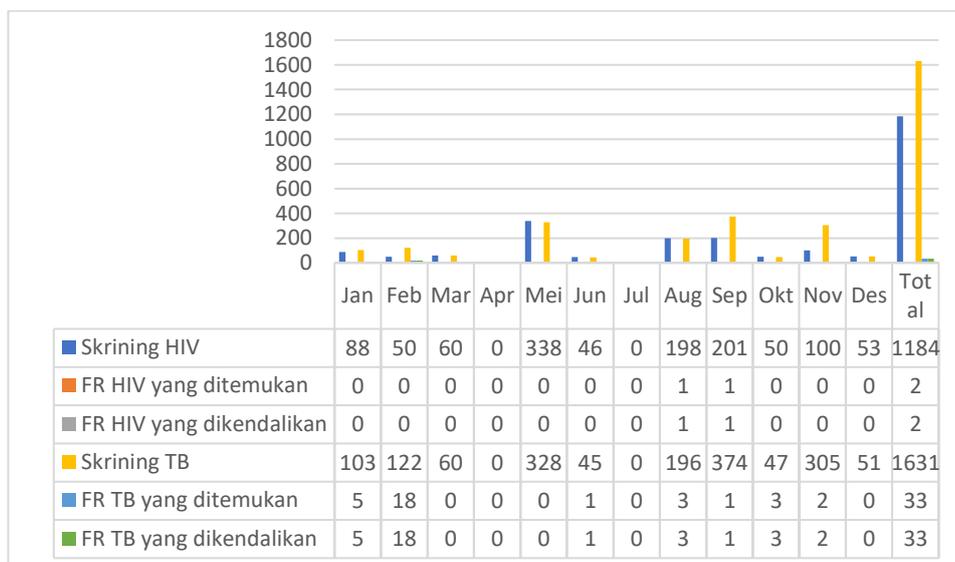
Jumlah Kunjungan poliklinik Embarkasi/Debarkasi JKS Bekasi dan Embarkasi/Debarkasi Kertajati pada bulan Mei sebanyak 665 jamaah, bulan Juni sebanyak 2.309 jamaah, bulan Juli sebanyak 361 jamaah dan bulan Agustus sebanyak 27 jamaah sehingga jumlah keseluruhan adalah sebanyak 3.362 jamaah dan rujukan jamaah ke Rumah Sakit Rujukan Haji sebanyak 95 jamaah.

Grafik 3.13 Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada pelayanan vaksinasi



Pengendalian pelayanan vaksinasi dilakukan pada pasien yang memiliki faktor risiko pada pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Yellow fever. Faktor risiko penyakit yang ditemukan adalah penyakit komorbid atau yang diderita pasien yang akan di vaksinasi, KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan lainnya. Dari 2.834 yang di vaksinasi terdapat 327 faktor risiko yang ditemukan (11,53%). Pengendalian yang dilakukan 100% dari faktor risiko yang ditemukan. Hal-hal yang dilakukan dalam tindakan pengendalian adalah memberikan terapi obat, edukasi dan penundaan pelaksanaan vaksinasi sampai pasien terkontrol dan tidak ditemukan KIPI.

Grafik 3.14 Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada skrining TB dan HIV Aids



Kegiatan skrining TB dan HIV dilaksanakan di wilayah kerja Palabuhanratu, Cirebon, Bandara Husein, Bandara Kertajati dan Indramayu serta Patimban. Untuk hasil skrining yang mengarah pada penyakit TB/HIV dilakukan rujukan ke fasyankes rujukan HIV/TB dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan penegak diagnosis lebih lanjut serta telah dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Jumlah capaian skrining HIV/TB adalah sebanyak 1.012 pemeriksaan dari target 1400 pemeriksaan (72,28%). Terdiri dari 504 pemeriksaan HIV dengan 0 faktor risiko dan 508 pemeriksaan Tuberkulosis dengan 13 faktor risiko. Jumlah yang diskriming menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pekerja disekitar wilayah kerja BKK Bandung untuk memeriksakan kesehatannya. Dalam pelaksanaan skrining TB/HIV dilakukan juga pemeriksaan kesehatan dasar sebagai tindakan pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas kesehatan pekerja di Bandara dan Pelabuhan.

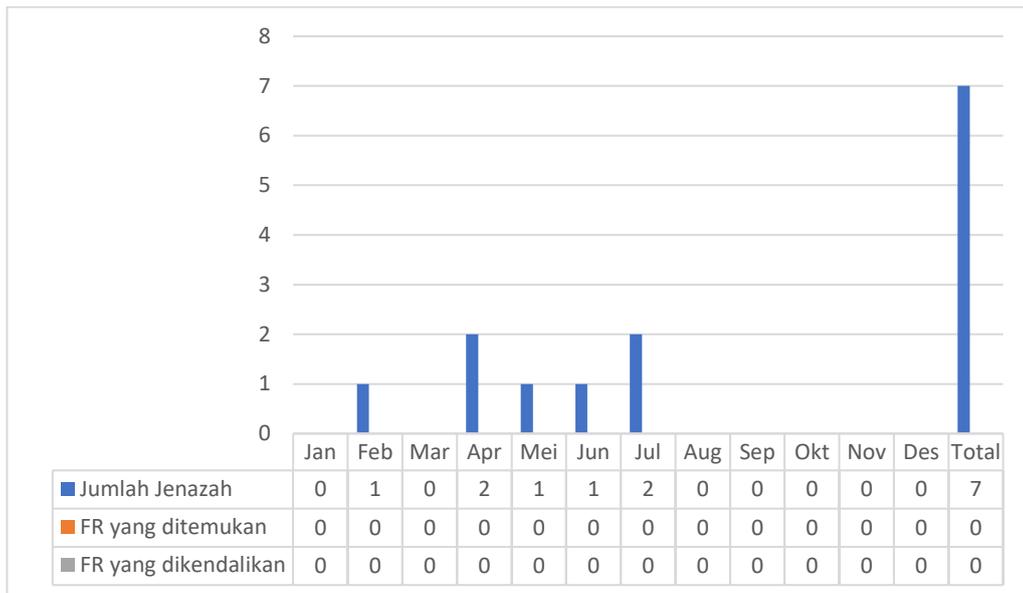
b. Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut

Pengendalian faktor risiko pada alat angkut dilakukan apabila ditemukan faktor risiko pada saat pemeriksaan alat angkut. Pengendalian dilakukan melalui tindakan sanitasi atau penyehatan seperti fumigasi atau disinfeksi. *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC) merupakan salah satu sertifikat sanitasi kapal yang diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi sesuai rekomendasi dalam pemeriksaan sanitasi. Pengendalian yang telah dilakukan adalah sebanyak 2 kapal dari 2 kapal yang ditemukan faktor risiko. Kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah berupa fumigasi kapal yang berada di Pelabuhan Cirebon.

c. Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang

Kegiatan ini dilakukan pada temuan dari pemeriksaan barang/jenazah yang beresiko terhadap kesehatan di pintu masuk negara Wilayah kerja BKK Bandung baik di Bandara maupun di Pelabuhan laut dan dilaporkan setiap ada temuan. Selama tahun 2024 ada 5 jenazah yang melalui Bandara Husein Sastranagara dan Kertajati tetapi tidak ditemukan jenazah dengan faktor risiko penyakit menular/wabah sehingga tindakan pengendalian tidak dilakukan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang akan diangkut hanya pemeriksaan dokumen. Apabila ada dokumen yang tidak lengkap atau ada jenazah dengan penyakit menular maka pengangkutan jenazah ditunda sampai dokumen lengkap sesuai dengan syarat yang diminta atau tidak diberangkatkan.

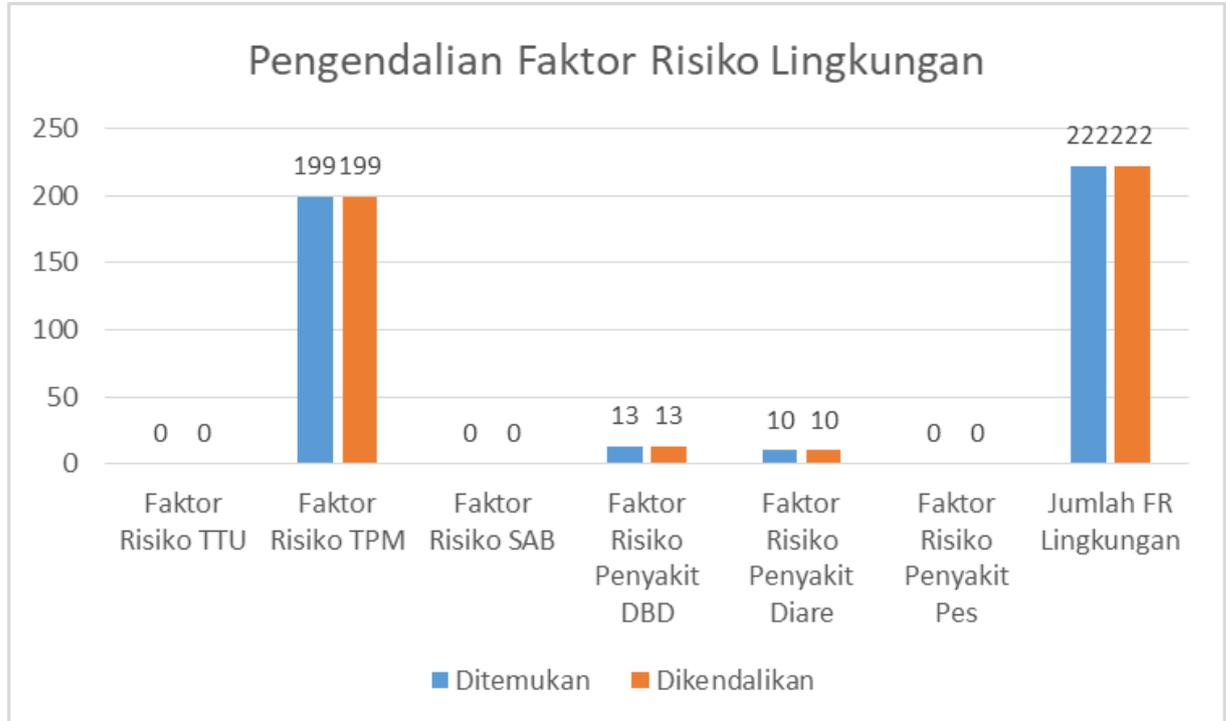
Grafik 3.15 Faktor Risiko yang dikendalikan pada barang



d. Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan

Jumlah faktor risiko lingkungan yang ditemukan dan dikendalikan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.16 Jumlah Faktor Risiko Lingkungan yang Ditemukan dan Dikendalikan Tahun 2024



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah faktor risiko lingkungan yang ditemukan dan dikendalikan pada tahun 2024 adalah sebanyak 222 faktor

risiko dengan rincian faktor risiko yang ditemukan pada TPM sebanyak 199 faktor risiko, faktor risiko penyakit DBD sebanyak 13 faktor risiko dan faktor risiko penyakit diare sebanyak 10 faktor risiko. Dari seluruh faktor risiko yang ditemukan 100 % faktor risiko tersebut dikendalikan.

Faktor risiko pada TPM yang ditemukan adalah 199 faktor risiko lainnya adalah TPM yang berdasarkan hasil inspeksi sanitasi terdapat indikator penilaian yang dinyatakan TMS baik dari bangunan maupun dari sarana prasarana penunjangnya. Kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah berupa pemberian rekomendasi dan pengawasan berkelanjutan pada TPM yang memiliki faktor risiko.

Faktor risiko penyakit DBD yang ditemukan adalah pelabuhan/bandara yang hasil survey vektor DBD (*Aedes aegypti*) yang dinyatakan tidak sesuai dengan standar baku mutu (HI Perimeter \neq 0 dan/atau HI buffernya $>$ 1) . Hasil kumulatif semester I tahun 2024 ditemukan sebanyak 13 faktor risiko DBD baik di perimeter maupun di buffer yang 100 % telah dikendalikan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah berupa perbaikan sanitasi lingkungan, larvasidasi, dan fogging.

Faktor risiko penyakit diare yang ditemukan adalah pelabuhan/bandara yang hasil survey kecoa dan/atau lalatnya dinyatakan tidak sesuai dengan standar baku mutu atau TMS ($>$ 2) yaitu secara kumulatif sebanyak 10 faktor risiko. Kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah dengan pemberian rekomendasi kepada penanggung jawab gedung/bangunan/tenan yang hasil survey kecoa dan/atau lalatnya melebihi standar baku mutu untuk meningkatkan sanitasi gedung/bangunan/tenan miliknya, kegiatan penggunaan lem kecoa/lalat, dan penggunaan insektisida untuk kecoa/lalat.

8. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Kendala/Permasalahan dalam capaian kinerja indikator Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Ditemukan faktor risiko skrining TB sedangkan faktor risiko skrining HIV tidak ditemukan dikarenakan rendahnya antusiasme sasaran skrining HIV khususnya ABK dan pekerja di sekitar pelabuhan dan lokasi pemeriksaan yang kurang mobilisasi.
- b. Ditemukan pasien dengan komorbid pada pelayanan vaksinasi sehingga terjadi penundaan yang mengakibatkan waktu vaksinasi berdekatan dengan tanggal keberangkatan.

- c. Ditetapkannya KMK No.HK.0107/Menkes/2118/2024 tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka status istitoah jamaah haji tetapi masih ditemukan calon jamaah haji tidak laik terbang sehingga beresiko menimbulkan konflik antara BKK, Dinas Kesehatan setempat dan calon jamaah haji.
- d. Kekurangan jumlah SDM terutama dokter di embarkasi haji untuk penentuan laik terbang mengingat calon jamaah haji banyak yang dirujuk dengan penyakit komorbid yang harus dievaluasi.
- e. Pemeriksaan penjamah makanan belum maksimal dilakukan sampai ke pemeriksaan HbsAg dan rectal swab, hanya sebatas pemeriksaan kesehatan TTV, kebersihan diri, skrining TB/HIV dan usap tangan.
- f. Penurunan jumlah yang divaksinasi Meningitis sedangkan kasus Meningitis di negara “meingitis belt” meningkat tetapi vaksinasi meningitis masih belum diwajibkan
- g. Permintaan ICV kontra indikasi dari masyarakat umum

Pemecahan masalah dalam capaian kinerja indikator Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas domisili pasien dan Membuat surat rujukan pemeriksaan TB/HIV ke puskesmas rujukan; dan tambahan pemeriksaan PTM guna meningkatkan antusiasme
- b. Pengulangan pengukuran tanda-tanda vital, istirahat dan pemberian obat sesuai indikasi yang ada dipoliklinik dan Pasien yang tidak layak untuk divaksinasi disarankan untuk melakukan pengobatan terlebih dahulu atau konsul dengan dokter spesialis. Vaksinasi dilakukan jika penyakit komorbidnya sudah terkontrol dan acc dari dokter spesialis.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Dinkes Kab.Kota melakukan sosialisasi tentang pemerikasaan laik pra embarkasi sehingga calon jamaah haji dapat diawasi kesehatannya sampai ke embarkasi.
- d. Koordinasi dengan BKK Kelas I Banten terkait kekurangan jumlah SDM untuk pelaksanaan dua embarkasi haji
- e. BKK menyarankan kepada penjamah makanan untuk pemeriksaan penunjang ke Laboratotium dan Rumah Sakit
- f. Edukasi dan sosialisasi kepada stake holder terutama agen travel dan KBIH tentang manfaat vaksinasi meningitis
- g. Edukasi kepada pemohon dan Pembuatan SOP kontra indikasi vaksinasi Internasional

2.1.3 INDIKATOR KETIGA

Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN

Adalah angka capaian pengendalian factor risiko berdasarkan faktor risiko yang ditemukan sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di pintu masuk.

a. Defenisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun

b. Rumus/Cara Perhitungan

$$indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$$

- Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage)
- Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max)
- Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)
- Persentase coverage maksimal 100 %

Parameter perhitungan terdiri dari:

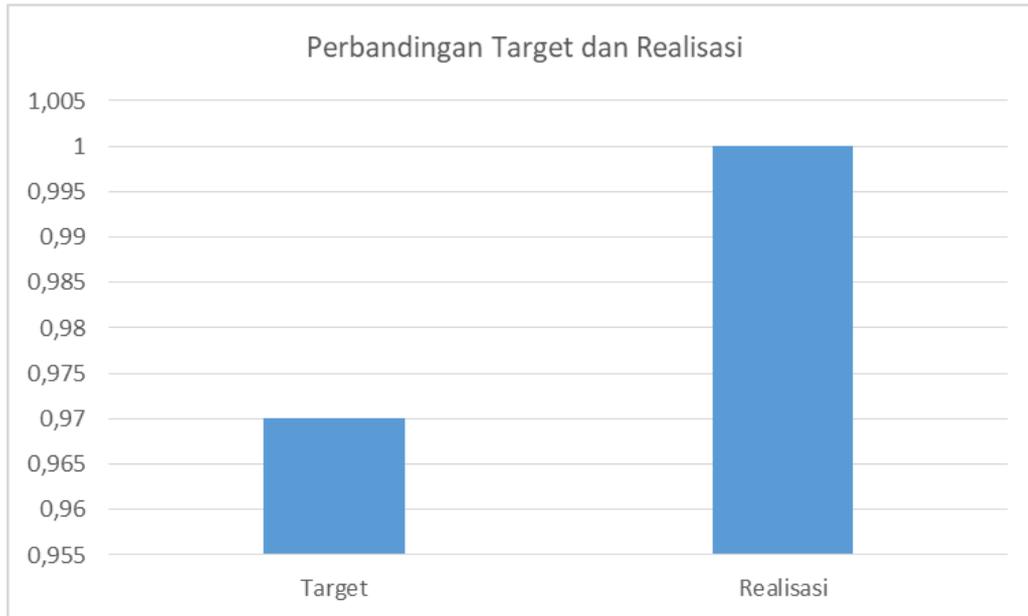
- 1) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
- 2) Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
- 3) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
- 4) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2
- 5) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2
- 6) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
- 7) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1
- 8) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
- 9) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
- 10) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

d. **Capaian Indikator**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target dan realisasi indikator indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

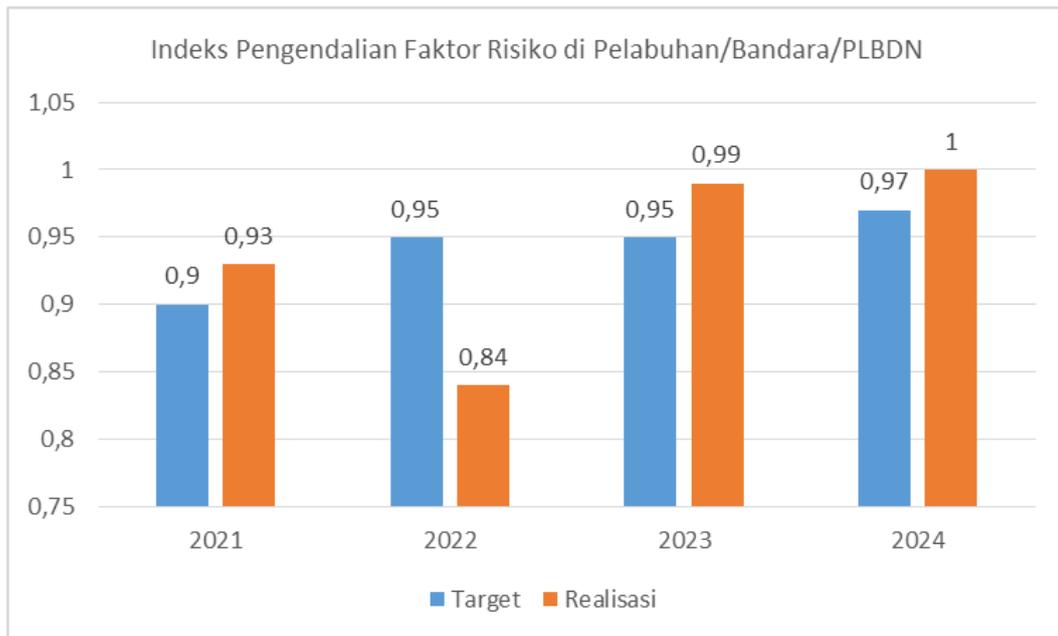


Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara tahun 2024 telah tercapai yaitu 1 bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 0.97. Persentase realisasi yaitu sebesar 103.09 %. Hal tersebut terjadi karena adanya dukungan SDM, anggaran dan koordinasi yang baik dengan stakeholder sehingga seluruh parameter perhitungan pada indikator ini dapat tercapai.

2. Perbandingan target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya disajikan pada grafik di bawah ini:

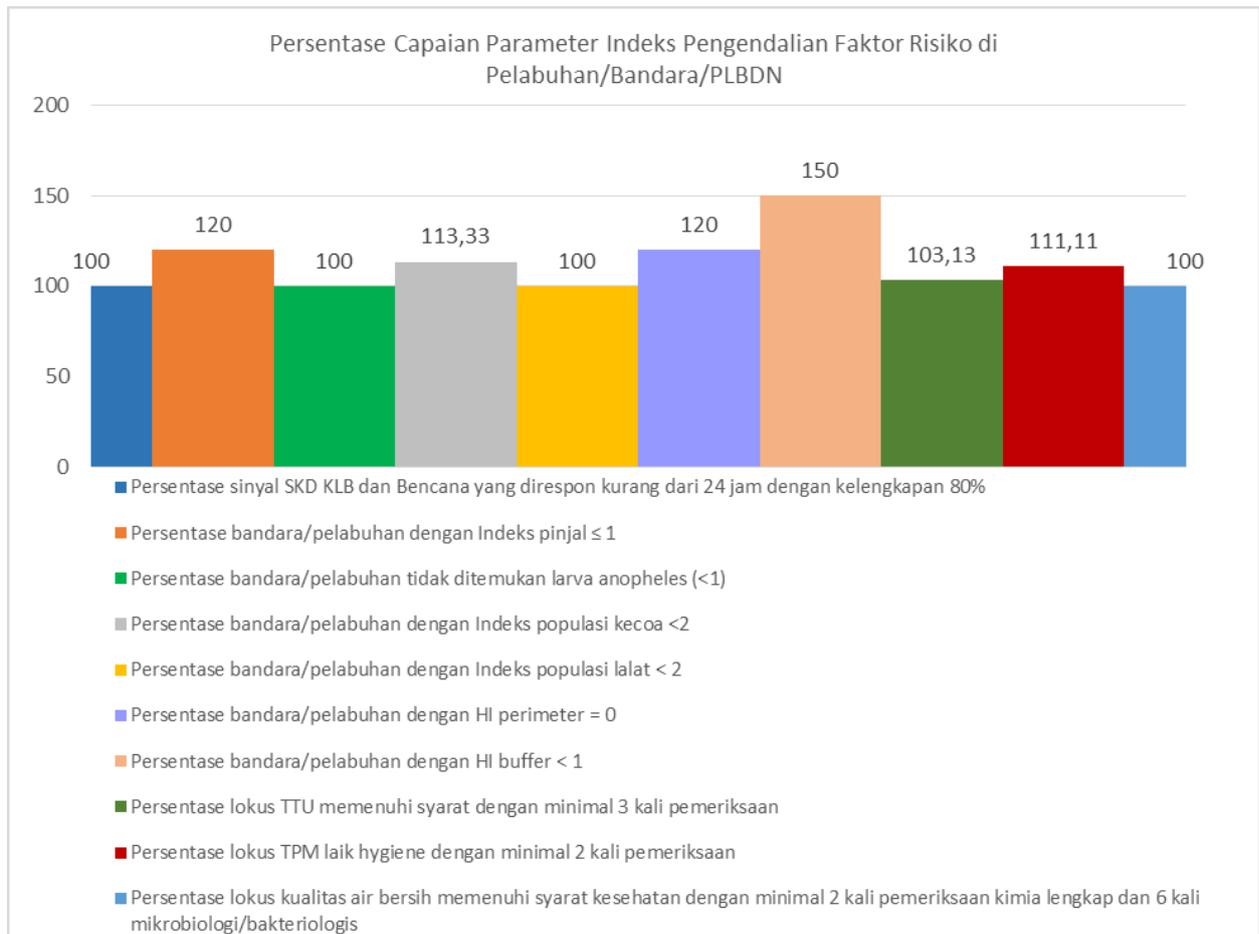
Grafik 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya



Dari grafik di atas diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN tahun 2024 tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN tahun 2024 yaitu 0,97 sementara realisasinya mencapai 1. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut didukung dengan berbagai aspek, diantaranya yaitu SDM yang kompeten, anggaran yang memadai, dan koordinasi yang baik antara petugas dan *stakeholder* yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

Capaian 10 (sepuluh) parameter perhitungan pada Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

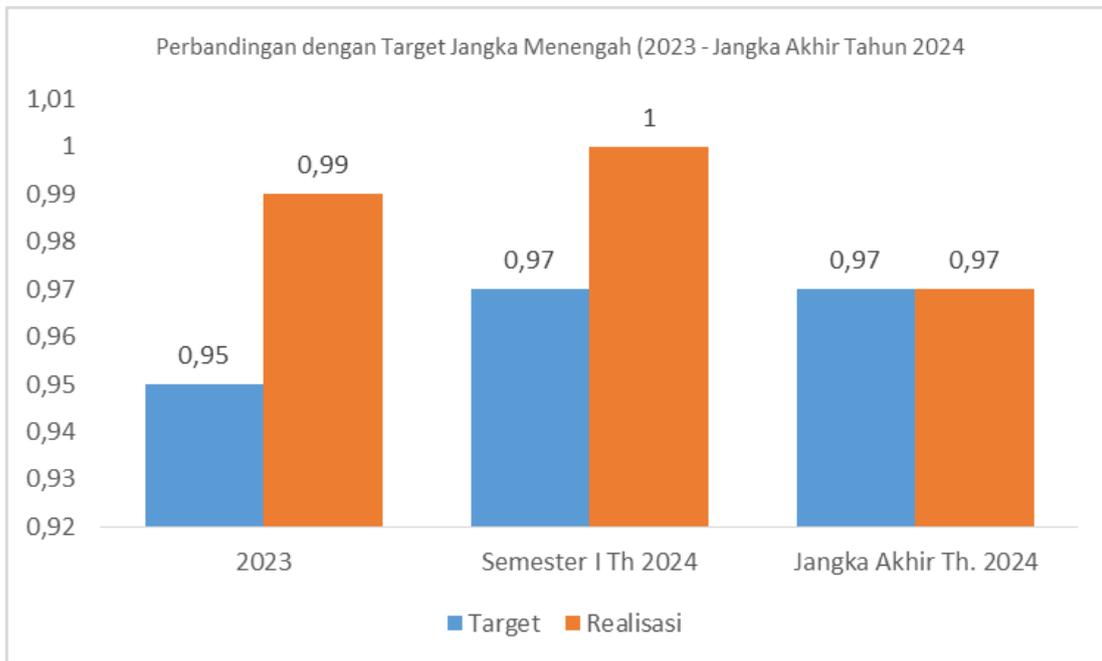
Grafik 3.19 Persentase Capaian Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2024



Dari grafik di atas diketahui bahwa tahun 2024 ini parameter yang capaiannya paling tinggi yaitu persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≤ 1 mencapai 120 %, dan yang capaiannya yang lain sudah mencapai 100 %. Hal tersebut terjadi karena adanya dukungan SDM, anggaran dan koordinasi yang baik dengan stakeholder sehingga seluruh parameter perhitungan pada indikator ini dapat tercapai.

- Perbandingan dengan target jangka menengah
Perbandingan target dan capaian tahun 2024 dengan target jangka menengah 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.20 Perbandingan Target dan Capaian dengan Target Jangka Menengah (2023 – Jangka Akhir Tahun 2024)

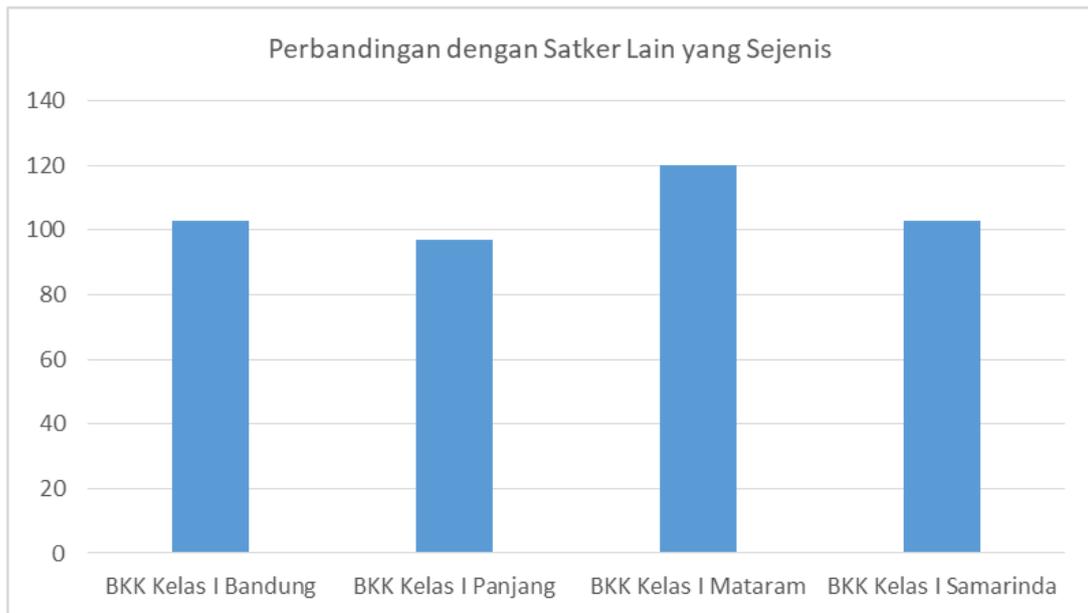


Dari grafik di atas diketahui bahwa realisasi indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN tahun 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini. Dengan melihat target dan realisasi pada tahun ini, dan memperhitungkan kemampuan unit kerja dalam mencapai target diprediksikan bahwa tahun 2024 target yang telah ditetapkan akan tercapai dan diprediksikan bahwa capaian indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN dapat mencapai 1.00 atau sebesar (103 %).

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis/setara

Perbandingan realisasi kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN pada tahun 2024 ini dibandingkan dengan satker lain yang sejenis yaitu BKK Kelas II Panjang, BKK Kelas II Mataram dan BKK Kelas II Padang. Adapun perbandingan realisasi dari keempat satuan kerja tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.21 Perbandingan Persentase Realisasi dengan Satuan Kerja Lain yang Sejenis



Dari grafik di atas diketahui bahwa diantara ke empat satker tersebut, yang memiliki persentase capaian yang paling tinggi berturut – turut yaitu BKK Kelas I Mataram mencapai 120 %, disusul oleh BKK Kelas I Bandung sebesar 103,09%, BKK Kelas I Samarinda sebesar 102,89% dan yang terakhir yaitu BKK Kelas II Panjang dengan capaian sebesar 97%. Dari ke empat satker tersebut yang telah mencapai target yang telah di tetapkannya terdapat 3 satker, sedangkan untuk BKK Kelas I Panjang belum mencapai target, dimana dari target 1 untuk capaian di semester I Tahun 2024 capaiannya masih 97% .

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN karena adanya beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- a. Ketersediaan SDM yang kompeten sesuai dengan bidangnya
- b. Adanya kader yang berperan aktif dalam kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (BPP) di seluruh wilayah kerja BKK Kelas I Bandung
- c. Adanya program pengawasan dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (BPP) yang dilakukan secara rutin setiap bulan
- d. Adanya program pengawasan TTU, TPM dan Sarana Penyediaan Air Bersih yang dilakukan rutin setiap bulan
- e. Adanya respon cepat apabila ada SKD KLB dan Bencana kurang dari 24 jam

- f. Adanya dukungan anggaran kegiatan layanan survei dan pengendalian vektor dan BPP
 - g. Ketersediaan alat dan bahan kegiatan survei dan pengendalian vektor dan BPP
 - h. Ketersediaan alat dan bahan kegiatan pengawasan TTU, TPM dan SAB
 - i. Adanya koordinasi lintas sektor dan program.
6. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator
- Adapun upaya yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tercapainya indikator indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN adalah sebagai berikut :
- a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 100%

Kebijakan SKD KLB mengacu pada Undang - undang Kekearifanan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang merupakan landasan hukum pelaksanaan kegiatan kekearifanan melalui kegiatan pengamatan/surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat serta respon terhadap KLB atau kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekearifanan kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah dengan merespon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD) KLB dan bencana dari surat edaran dirjen P2P yang masuk ke BKK Kelas I Bandung dalam bentuk surat kepada stakeholder di pintu masuk negara. Selain itu dukungan SDM dalam melakukan sinyal respon SKD KLB ini menjadi salah satu faktor pencapaiannya.
 - b. Pengawasan dan Pengendalian Vektor Pes (Tikus dan Pinjal)

Kegiatan pengawasan dan pengendalian tikus dan pinjal dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pelabuhan/bandara dengan indeks pinjal ≤ 1 . Kegiatan yang dilakukan yaitu pemasangan perangkap tikus secara rutin yaitu setiap 40 hari sekali berdasarkan siklus hidup tikus. Hal tersebut dilakukan untuk memonitoring indeks pinjalnya, maka pada tikus yang ditangkap kemudian dilakukan penyisiran dan identifikasi. Apabila diketahui indeks pinjal > 1 maka pengendalian yang harus dilakukan adalah *dusting*, sedangkan apabila indeks pinjal ≤ 1 kegiatan yang dilakukan hanya monitoring berkala dengan menggunakan perangkap tikus. Kegiatan pengawasan tikus dan pinjal dilakukan di seluruh pelabuhan/bandara yang menjadi wilayah kerja BKK Kelas I Bandung. Kegiatan ini di dukung oleh anggaran layanan survey vektor pes pada DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2024.
 - c. Pengawasan Vektor Malaria (*Anopheles sp.*)

Kegiatan pengawasan vektor malaria dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai upaya untuk mewujudkan pelabuhan/bandara dengan indeks larva *Anopheles* = 0

(tidak ditemukan larva Anopheles). Apabila hasil survey dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dilakukan kegiatan pengendalian berupa perbaikan sanitasi lingkungan/PSN, larvasidasi/oilisasi dan atau spraying. Kegiatan ini di dukung oleh anggaran layanan survey faktor risiko penyakit malaria pada DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2024.

d. Pengawasan dan Pengendalian Vektor Diare (Kecoa dan Lalat)

Kegiatan pengawasan vektor diare (Kecoa dan Lalat) dilakukan rutin setiap bulan sebagai upaya untuk mewujudkan pelabuhan/ bandara dengan kepadatan kecoa dan lalat memenuhi standar baku mutu (< 2). Dilakukan dengan menghitung indeks populasi kecoa dan lalat. Survey kecoa dilakukan dengan menggunakan perangkap kecoa dengan lem dan umpan/attractant lalu dihitung kepadatan kecoanya, sedangkan kepadatan lalat dihitung dengan pengukuran menggunakan *flygrill*. Apabila kepadatan kecoa dan atau lalatnya nya dinyatakan tidak sesuai dengan standar baku mutu pengendalian yang dilakukan yaitu spraying ataupun penggunaan lem berinsektisida. Kegiatan ini di dukung oleh anggaran layanan survey faktor risiko penyakit diare dan pengendalian vektor diare pada DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2024

e. Pengawasan dan Pengendalian Vektor DBD (*Aedes aegypti*).

Kegiatan pengawasan vektor diare dilakukan rutin setiap bulan sebagai upaya untuk mewujudkan pelabuhan/ bandara dengan HI (House Indeks) Perimeter = 0 dan HI buffer ≤ 1 . Dilakukan dengan melakukan survey jentik *Aedes spp.* secara rutin setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. Apabila hasil survey diketahui HI $\neq 0$ untuk perimeter dan HI > 1 untuk buffer atau dikatakan tidak sesuai standar baku mutu, maka dilakukan kegiatan pengendalian baik itu perbaikan sanitasi lingkungan dan PSN, larvasidasi dan atau fogging. Apabila hasil survey jentik secara terus menerus 0, maka dilakukan pemasangan ovitrap (perangkap telur). Kegiatan ini di dukung oleh anggaran layanan survey faktor risiko penyakit DBD dan pengendalian faktor risiko penyakit DBD pada DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2024

f. Pengawasan Hygiene Sanitasi Bangunan Umum (HSBU)

Kegiatan yang dilakukan adalah inspeksi HSBU pada tempat – tempat umum (TTU) yang dilakukan secara berkala minimal 3 kali dalam 1 tahun. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan TTU sesuai dengan standar kekarantina kesehatan. Parameter yang diperiksa adalah meliputi fisik bangunan, kebisingan, pencahayaan, air bersih, keberadaan vektor, sampah dan lain – lain. Apabila hasil inspeksi diantara parameter yang diperiksa ada yang tidak sesuai segera diberikan rekomendasi kepada pemilih/penanggungjawab bangunan.

g. Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan inspeksi hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang ada di lingkungan pelabuhan/bandara yang dilakukan secara rutin. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang laik hygiene di lingkungan pelabuhan dan bandara. Parameter yang diperiksa adalah lokasi dan fisik bangunan, fasilitas sanitasi, dapur, ruang makan, bahan makanan, makanan jadi, proses pengolahan makanan, peralatan masak maupun makan yang digunakan sampai dengan penjamah makanannya. Apabila hasil inspeksi diantara parameter yang diperiksa ada yang tidak sesuai segera diberikan rekomendasi kepada pemilik/penanggungjawab TPM agar parameter tersebut berubah statusnya menjadi memenuhi syarat. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksaan laboratorium pada makanan minuman, alat makan/ alat memasak maupun kesehatan penjamahnya yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

h. Pengawasan Sarana Penyediaan Air Bersih (SAB)

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan inspeksi pada sarana penyediaan air bersih secara rutin setiap bulan dan melakukan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas air bersih yang digunakan di bandara/pelabuhan memenuhi syarat. Kegiatan ini di dukung oleh anggaran pada DIPA BKK Kelas I Bandung TA 2024.

7. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Kendala/Permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

- a. Karakteristik lokus TPM yang ada di beberapa wilayah kerja BKK Kelas I Bandung seperti Pelabuhan Karangsong Indramayu, Pelabuhanratu Sukabumi dan Pelabuhan Cirebon yang diantaranya merupakan Pelabuhan ikan menyulitkan untuk melakukan intervensi pada parameter yang dikategorikan tidak memenuhi syarat, karena pada umumnya parameter yang dinilai tidak memenuhi syarat adalah terkait dengan fisik bangunan sampai dengan sarana pendukungnya.

Pemecahan Masalah yang dilakukan yaitu :

- a. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan terus melakukan koordinasi dan edukasi kepada pengelola TPM untuk terus melakukan upaya perbaikan pada TPMnya.

2.1.4 INDIKATOR KEEMPAT

Nilai kinerja anggaran

Adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran berdasarkan hasil perhitungan realisasi anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA

a. Defenisi Operasional

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :

1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan.
2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan
3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

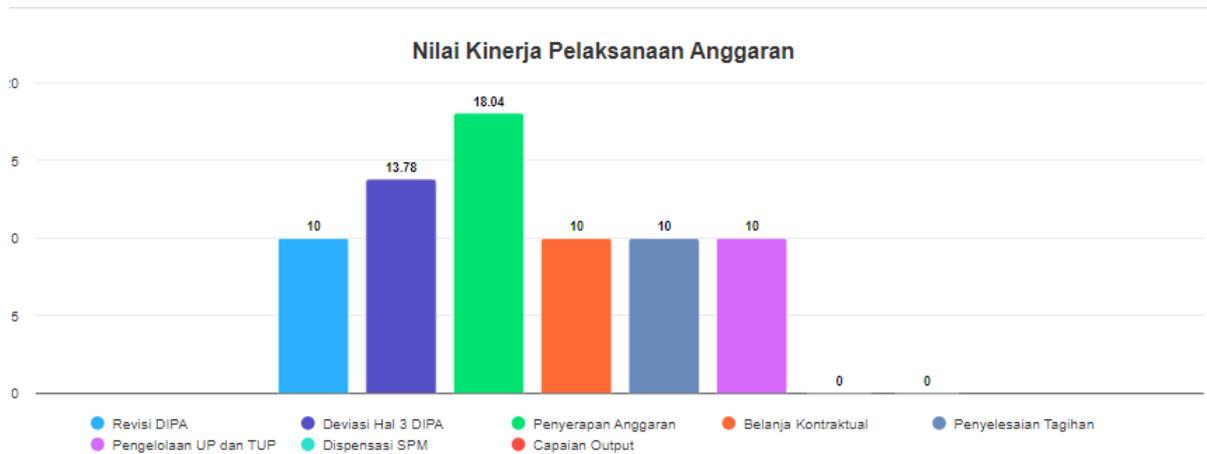
b. Rumus/Cara Perhitungan

Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

c. Capaian Indikator

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Nilai kinerja anggaran BKK Kelas I Bandung pada tahun 2024 semester I yaitu 42,27 berkategori kurang dan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 82 sehingga capaian kinerja sebesar 51,55%. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari penilaian setiap parameter berikut:

Grafik 3.22 Indikator Nilai Kinerja Anggaran



Berdasarkan Grafik di bawah ini, indikator Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi e Monev DJA, mendapatkan skor 42,27 sehingga realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran semester I tahun 2024 adalah sebesar 51,55%

Grafik 3.23 Target dan Capaian Kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024



- Perbandingan target dan realisasi Semester I Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2024 merupakan tahap kelima pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya semester I tahun 2023 karena target tahun 2024 lebih besar dari pada tahun 2023.

Grafik 3.24 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran di BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2020 s.d 2024



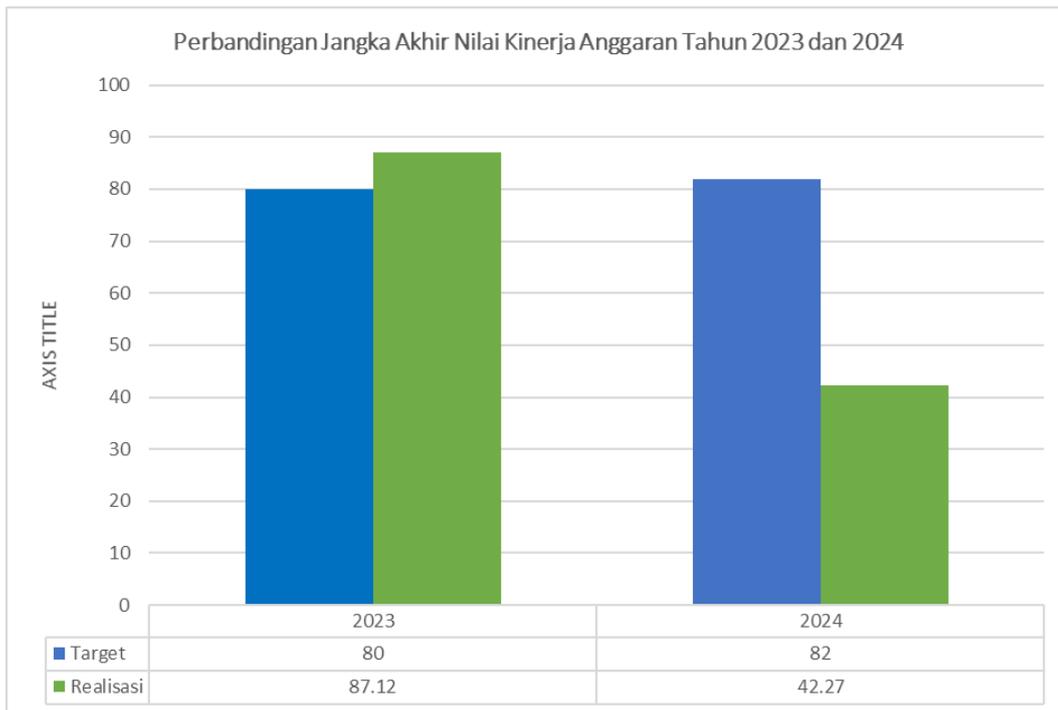
3. Perbandingan dengan target Nasional (Renstra/RAP/Permenkes)

Dalam Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024, target Nilai Kinerja Anggaran Kemenkes pada tahun 2024 yaitu 95. Sehingga Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Bandung pada tahun 2024 lebih rendah dari target Rencana Strategis yaitu 42,27.

4. Perbandingan dengan target Jangka Akhir

Perbandingan capaian Nilai kinerja Anggaran BKK Kelas I Bandung Semester I tahun 2024 dengan target capaian kinerja jangka akhir BKK Kelas I Bandung Tahun 2023 - 2024 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

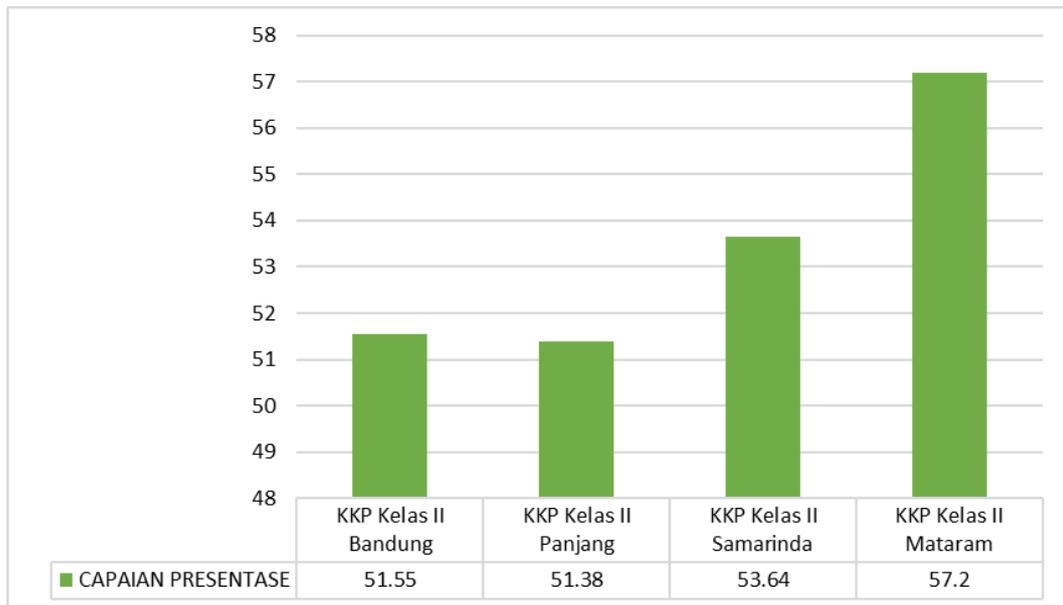
Grafik 3.25 Perbandingan Jangka Akhir Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dan 2024



Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Semester I Tahun 2024 belum melebihi target jangka akhir hingga 2024 sebesar 82 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024. Hal tersebut bisa dilakukan optimalisasi capaian realisasi anggaran dan capaian rincian output dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola program, pengelola monev dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang terlaksana dengan baik sehingga pada tahun 2024 realisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran dapat memenuhi angka 82 dengan nilai sangat baik dan memenuhi capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis/setara
Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Bandung tahun 2023 dengan target capaian kinerja BKK Mataram, BKK Panjang dan BKK Padang dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.26 Perbandingan Jumlah Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2024 dibandingkan dengan KKP Sejenis



Pada grafik diatas terlihat bahwa BKK Kelas I Bandung dari target 82 telah tercapai 42,27 (51,55%), BKK Kelas II Mataram dari target 85 telah tercapai 51,38 (60,44%), BKK Kelas II Samarinda dari target 88 telah tercapai 47,20 (53,64%), dan BKK Kelas II Panjang dari target 92 telah tercapai 52,62 (57,20%). Untuk indikator ini dapat disimpulkan bahwa semua BKK telah mencapai target yang telah ditentukan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan tercapainya target peningkatan Nilai Kinerja Anggaran di BKK Kelas I Bandung TA. 2024 adalah sebagai berikut :

- Adanya GAP antara Target Capaian Output di awal tahun dengan Realisasi Capaian Output yang dihasilkan setiap bulannya dikarenakan adanya perubahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan pada kegiatan Program dan Dukungan Manajemen.

7. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Penyusunan anggaran BKK Kelas I Bandung TA 2024 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan anggaran TA 2024 telah diupayakan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana.

8. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah.

Adapun kendala/permasalahan yang ada dalam melaksanakan yaitu :

- Adanya GAP antara Target Capaian Output di awal tahun dengan Realisasi Capaian Output yang dihasilkan setiap bulannya dikarenakan adanya perubahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan pada kegiatan Program dan Dukungan Manajemen.

Pemecahan masalah yang dilakukan yaitu :

- Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana.

2.1.5 INDIKATOR KELIMA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

a. Defenisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

d. Rumus/Cara Perhitungan

Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP dan capaian output dikurangi dispensasi SPM

e. Capaian Indikator

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja semester ini

Target indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk tahun 2024 adalah sebesar 93 dengan, realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 94,39.

Parameter nilai IKPA tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Indikator

No	Parameter	Indikator	Nilai
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100
		Deviasi Hal III DIPA	100
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	97,36
		Belanja Kontraktual	100
		Penyelesaian Tagihan	100
		Pengelolaan UP dan TUP	100
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	79,69
Nilai Total			94,39
Konvensi Bobot			100
Dispensasi SPM (Pengurang)			0
Nilai Akhir			94,39

2. Perbandingan target dan realisasi semester ini dan beberapa tahun sebelumnya. Untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, maka kegiatan pelaksanaan anggaran satker yang harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan untuk memperoleh bobot nilai IKPA yang maksimal adalah:
- Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III DIPA
 - Data Kontrak
 - Penyelesaian Tagihan
 - Pengelolaan UP dan TUP
 - Penyerapan Anggaran
 - Capaian Output

Indikator Dispensasi SPM dihitung sebagai pengurang nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

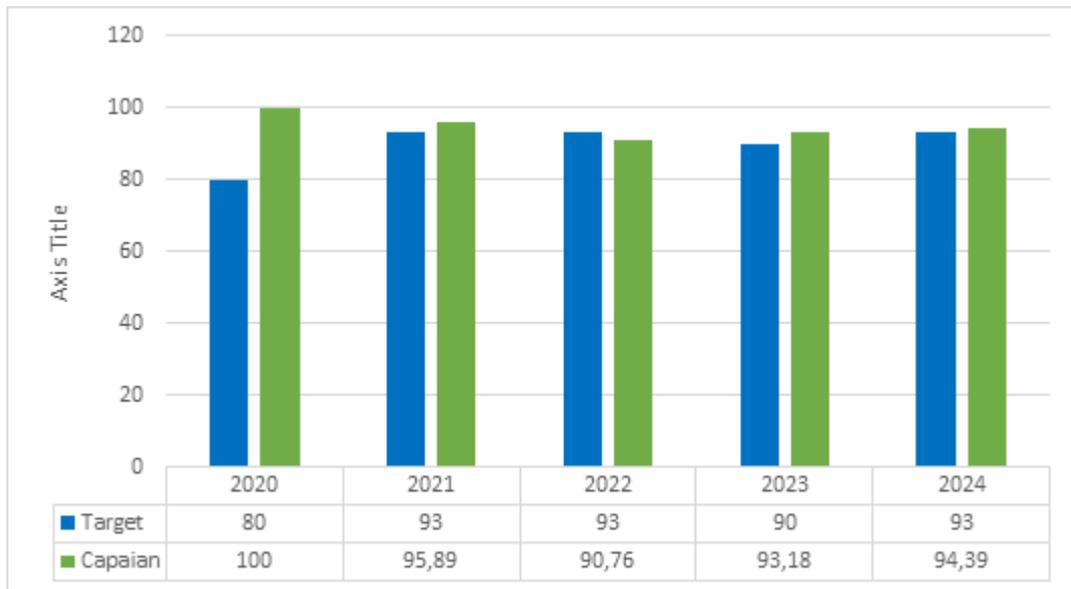
Capaian Output Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebelum tahun 2024 dapat dihitung dari nilai masing-masing indikator pendukung yang dapat dilihat pada table berikut berikut:

**Tabel 3.6 Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I
Bandung Tahun 2020 s.d Juni 2024**

No	Penunjang Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	Juni 2024
1	Revisi DIPA	100	100	100	100	100
2	Penyesuaian Halaman III DIPA	75,31	75,52	55,73	59,15	100
3	Pengelolaan UP	88	100	97,24	94,85	100
4	Penyampaian LPJ Bendahara	100	100	-	-	-
5	Penyampaian Data Kontrak	100	100	86,30	94,60	100
6	Penyelesaian Tagihan	100	100	100	100	100
7	Penyerapan Anggaran	97,33	87,77	84,18	91,58	97,36
8	Retur SP2D	100	100	-	-	-
9	Perencanaan Kas	0	0	-	-	-
10	Pengembalian/Kesalahan SPM	90	90	-	-	-
11	Pagu Minus	100	100	-	-	-
12	Dispensasi SPM	00	100	100	100	0
13	Konfirmasi Capaian Output	91,67	97,95	100	100	79,69
Nilai Akhir		100	95,89	90,76	93,18	94,39

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran dari tahun 2020 sd 2023 selalu lebih dari 90% (kategori baik). Nilai tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 100% sedangkan nilai sampai dengan bulan Juni 2024 lebih baik dari tahun 2023 ditunjang dari nilai deviasi Hal III DIPA, belanja kontraktual dan nilai penyerapan anggaran namun nilai konfirmasi capaian output senilai 76,69 masih dalam kategori cukup dikarenakan realisasi capaian output masih belum sesuai dengan target yang telah ditentukan pada awal tahun 2024. Hal ini dikarenakan belanja yang bersumber PNBPN tidak bisa maksimal di realisasikan akibat kurangnya setoran penerimaan PNBPN sampai dengan bulan Juni 2024.

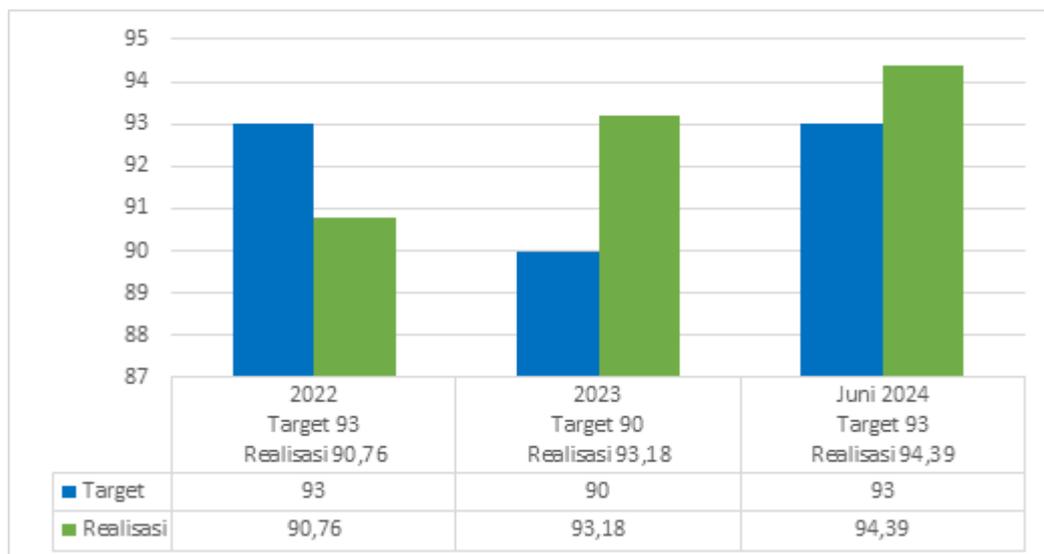
Grafik 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2020 s.d Juni 2024



3. Perbandingan dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Bandung bulan Juni 2024 dengan target capaian kinerja jangka menengah BKK Kelas I Bandung (Tahun 2022 -2024) dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2022 s.d Juni 2024

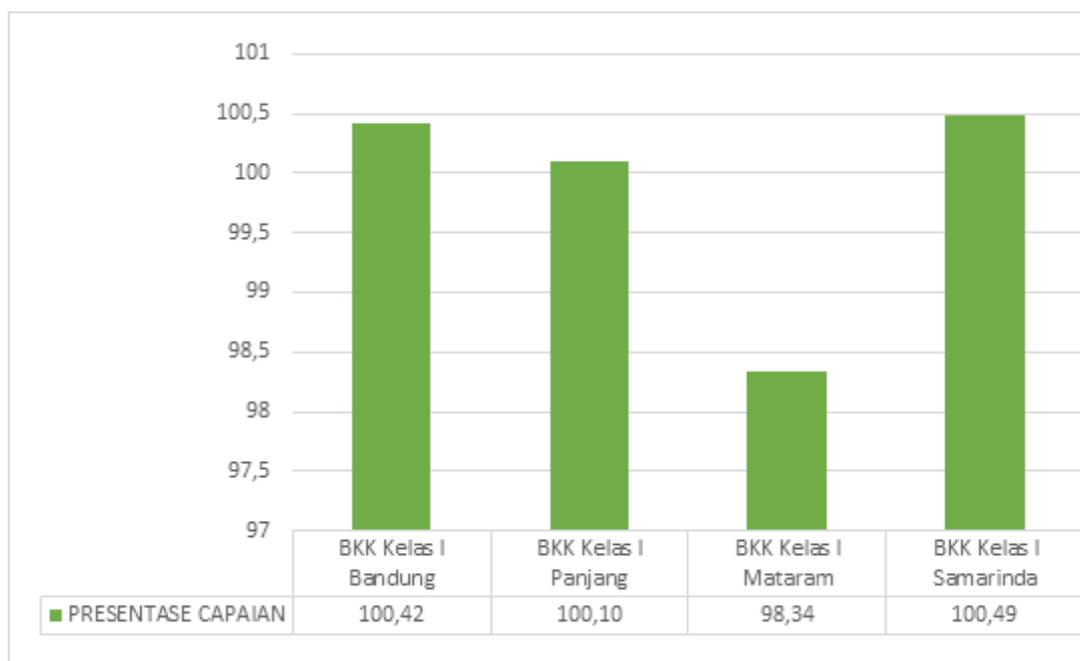


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa capaian kinerja pelaksanaan anggaran dari tahun 2022 s.d 2024 tetap stabil dimana capaian kinerja tetap di atas 90 namun untuk

tahun 2022 tidak mencapai target yang ditentukan yaitu 93. Tahun 2024 proyeksi target sebesar 93, sampai dengan bulan Juni 2024 capaian kinerja pelaksanaan anggaran sudah mencapai target sebesar 94,39. Hal ini dikarenakan telah dilakukan pemantauan dan pengendalian Rencana Operasional Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan Halaman III DIPA secara berkala dan selektif untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis/setara
Membandingkan antara capaian kinerja Juni 2024 dengan BKK Kelas I Panjang, BKK Kelas I Mataram dan BKK Kelas I Samarinda. Perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan kinerja anggaran BKK Kelas I Bandung Juni 2024 dengan capaian kinerja BKK Kelas I Panjang, BKK Kelas I Mataram dan BKK Kelas I Samarinda dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BKK Kelas I Bandung pada Juni 2024 dibandingkan dengan BKK Sejenis



Pada grafik diatas terlihat bahwa BKK Kelas I Bandung dari target 93 telah tercapai 94,39 (100,42%), BKK Kelas I Panjang dari target 98 telah tercapai 98,10 (100,10%), BKK Kelas I Mataram dari target 93 telah tercapai 91,46 (98,34%) dan BKK Kelas I Samarinda dari target 95 telah tercapai 95,47 (100,49%). Untuk indikator ini dapat disimpulkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2024 hampir seluruh BKK telah

mencapai target, hanya BKK Kelas I Mataram yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan tercapainya target peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BKK Kelas I Bandung Juni 2024 adalah sebagai berikut:

- Keberhasilan

- a. Para pengelola keuangan telah mengikuti e-learning atau pelatihan mengenai Strategi Meningkatkan Nilai IKPA secara daring maupun luring yang diadakan Kementerian Keuangan.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Kasubbag Administrasi umum terhadap pengelolaan keuangan sehingga komponen IKPA seperti Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA mendapat nilai maksimal (nilai 100)
- c. PPK dan Pengelola keuangan lainnya menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan anggaran sehingga Data Kontrak dan Penyelesaian Tagihan (nilai 100)
- d. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
- e. Pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang bersumber dana dari RM dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu
- f. Penginputan capaian output dilaksanakan secara tepat waktu
- g. Didukung oleh aplikasi eksternal seperti SAKTI dan OMSPAN serta aplikasi internal seperti SINADI dan SIMANDJA
- h. Pemanfaatan platform digitalisasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat mempermudah pekerjaan

- Kegagalan

- a. Pengelolaan uang persediaan bersumber PNBPN mengalami hambatan akibat setoran penerimaan PNBPN yang belum maksimal, sehingga saat sudah dalam batas maksimum pencairan PNBPN Tahap I tidak dapat mengajukan maksimum pencairan Tahap II (baru bisa diajukan bulan Juli apabila setoran PNBPN belum mencapai 80%)
- b. Masih terdapat rincian output yang realisasinya belum sesuai dengan target sehingga nilai capaian output belum maksimal
- c. Belum maksimal penggunaan UP KKP (Kartu Kredit Pemerintah) karena penggunaan jenis KKP pengadaan barang dan jasa, sedangkan 2 kartu lainnya jenis perjalanan dinas belum maksimal.

6. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator
BKK Kelas I Bandung sampai dengan bulan Juni 2024 telah mencapai nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lebih baik dari sebelumnya karena selalu berupaya menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:
 - a. Melaksanakan reviu DIPA minimal per triwulan, meminimalkan revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan
 - b. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cutoff
 - c. Melakukan percepatan belanja khususnya belanja modal, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan
 - d. Mengutamakan pengajuan belanja bersumber Rupiah murni disaat belanja bersumber PNBPN terhambat
 - e. Mengupayakan ketepatan waktu dalam mendaftarkan kontrak ke KPPN, dan tepat waktu dalam pembayaran kontraktual
 - f. Menyelesaikan dan tidak menunda penyelesaian tagihan, lebih teliti dan akurat dalam pengisian SPM.
 - g. Menggunakan UP Tunai dan KKP secara efektif dan efisien dan memperhatikan jatuh tempo revolving GUP
 - h. Memantau pengajuan SPM dan memitigasi risiko kesalahan rekening rekanan
 - i. Menghitung capaian output secara periodik, tepat waktu dan selalu melakukan monitoring di Aplikasi OMSPAN

7. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kegiatan yang bersumber PNBPN hanya bisa terserap 38.92% atau sebesar Rp 534.513.029 akibat dari target setoran penerimaan PNBPN tidak maksimal di tahun lalu dan mempengaruhi maksimum pencairan PNBPN Tahap I yang hanya diberikan 40% dari pagu belanja PNBPN yaitu Rp 549.407.600. Syarat mengajukan MP PNBPN Tahap II adalah apabila satker mencapai setoran penerimaan PNBPN 80%. Sehingga tidak ada realisasi belanja sumber PNBPN selama bulan Juni 2024
- b. Belum maksimalnya penggunaan GU KKP padahal porsi 40 % dari UP RM
- c. Realisasi capaian output masih dibawah target sehingga nilai konfirmasi capaian output masih belum maksimal

Solusi/pemecahan permasalahan yang dilakukan yaitu:

- a. Mengoptimalkan realisasi belanja bersumber RM yang tidak terdapat hambatan agar bisa menjadi daya ungkit realisasi anggaran satker

- b. Mengajukan MP PNBPN Tahap II di bulan Juli 2024
- c. Melakukan monitoring realisasi penggunaan GU KKP sehingga dapat dioptimalkan penggunaan GU KKP
- d. Koordinasi secara terintegrasi dalam penyusunan capaian output sehingga nilai capaian output sesuai target

2.1.6 INDIKATOR KEENAM

Kinerja implementasi WBK satker

Adalah hasil penilaian kinerja atas implementasi WBK pada satker berdasarkan unsur penilaian manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a. Defenisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assessment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

b. Rumus/Cara Perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

c. Capaian Indikator

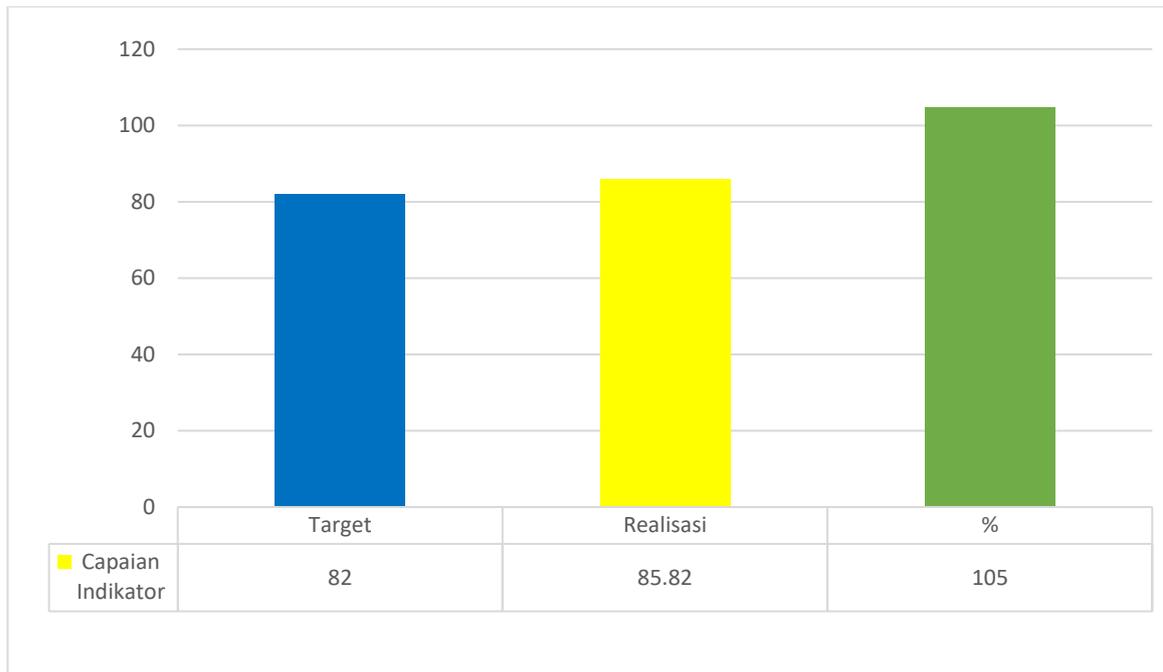
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target indikator Kinerja Implementasi WBK Satker tahun 2024 adalah sebesar 82 berdasarkan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 yaitu dimana penetapan unit kerja menuju WBK memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. Dari hasil berita acara hasil desk reviu kinerja implementasi WBK tahun 2023 yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023, BKK Kelas I Bandung mendapatkan nilai total sebesar 85,82 berdasarkan dari target yang ditentukan sebesar 82. Pada semester 1 tahun 2024 masih menggunakan penilaian/assessment tahun 2023. Selain itu adanya update/pembaruan SK Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BBK Kelas I Bandung pada tanggal 22 Juli 2024. Dari hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian indikator kinerja implementasi WBK dibandingkan dengan target yaitu sebesar 105% pada tahun 2024.

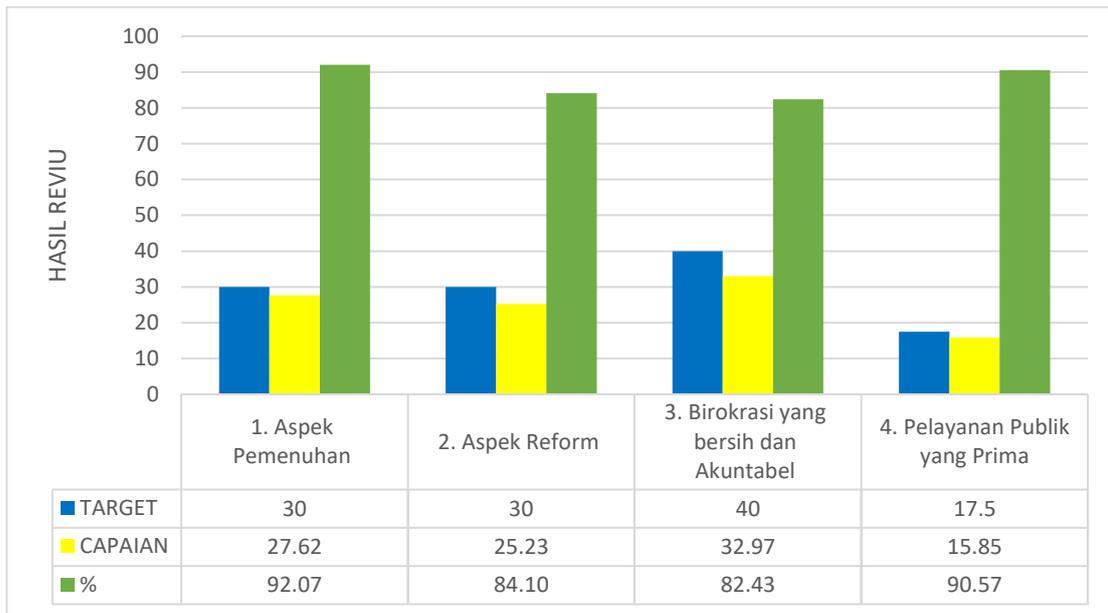
Adapun capaian indikator kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Bandung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.30 Perbandingan Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Bandung



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi indikator Kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Bandung telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.31 Perbandingan Capaian Indikator Penunjang



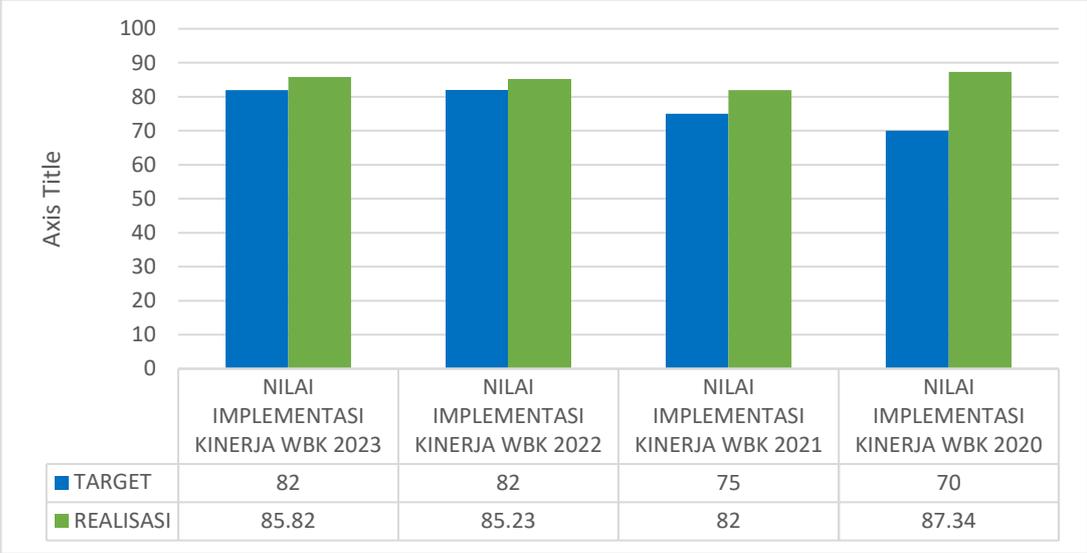
Berdasarkan grafik indikator penunjang Kinerja implementasi WBK satker dengan capaian tertinggi yaitu pada indikator Aspek Pemenuhan, Sedangkan capaian terendah pada indikator Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Namun dari total keseluruhan telah mencapai target indikator yang telah ditentukan yaitu sebesar 85,82 dari target indikator kinerja implementasi WBK Satker sebesar 82.

2. Perbandingan target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Penilaian WBK BKK Kelas I Bandung dimulai tahun 2020 capaian kinerja nilai kinerja sebesar 124,8%, tahun 2021 sebesar 109%, tahun 2023 sebesar 103% dan di tahun 2024 sebesar 105% dapat disimpulkan bahwa target kinerja implementasi WBK pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 82 lebih tinggi daripada target tahun 2020 dan 2021 karena Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 yaitu dimana penetapan unit kerja menuju WBK memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.

Perbandingan capaian Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2020 s.d 2024 disajikan pada grafik dibawah ini.

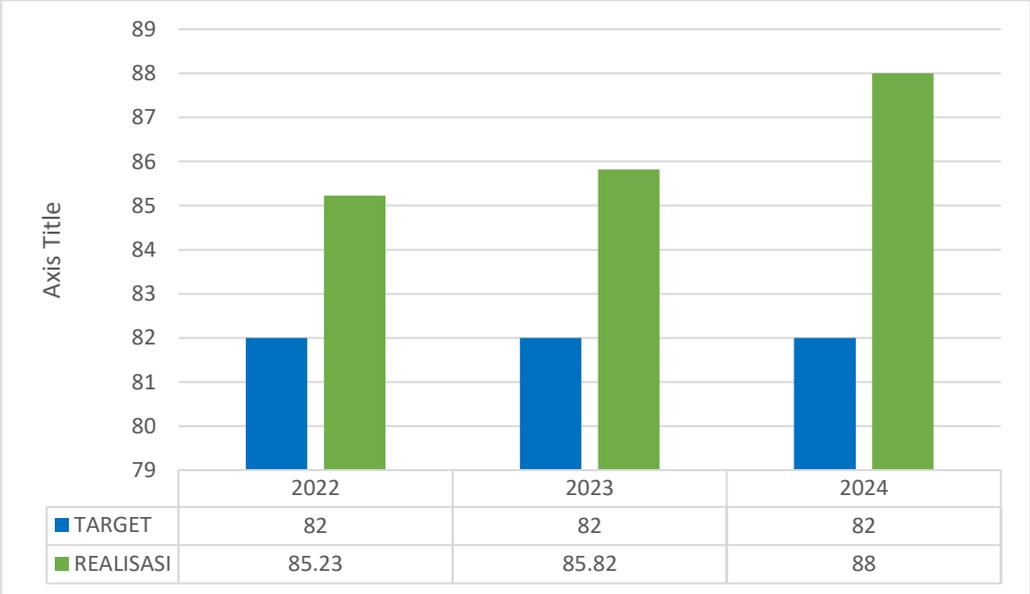
Grafik 3.32 Perbandingan capaian Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2020 s.d 2024



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa target kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2020 s.d 2024 telah tercapai >100%.

- 3. Perbandingan dengan target jangka menengah
 Capaian Kinerja implementasi WBK satker diperbandingkan dengan target capaian kinerja sampai tahun 2024 maka dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2020 dengan Target 2020 – 2024

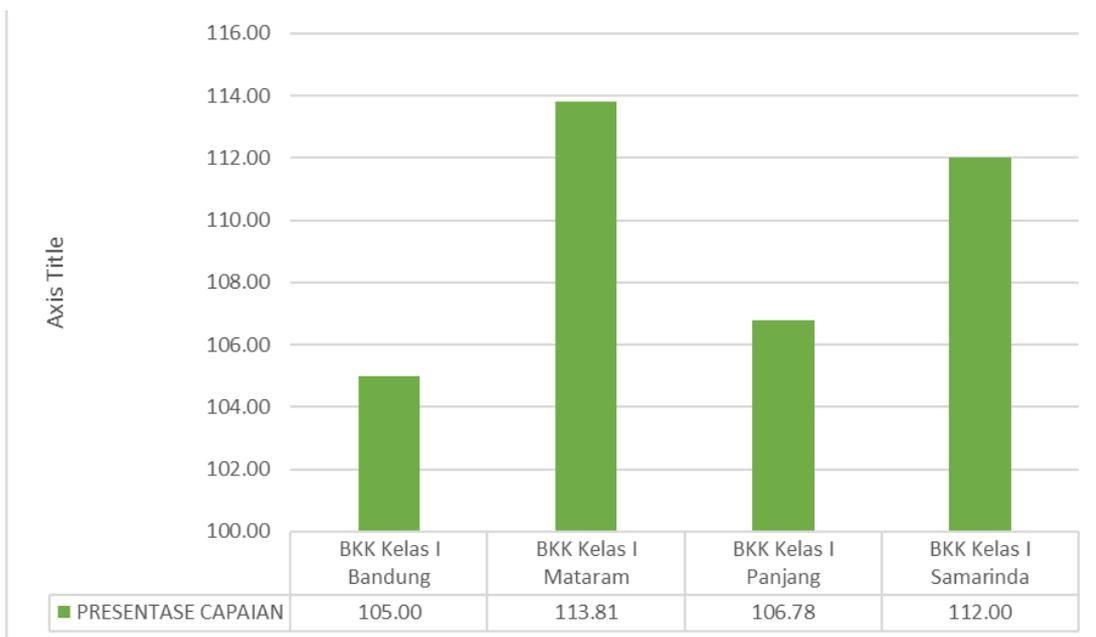


Capaian Kinerja implementasi WBK satker pada Tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun tersebut yakni sebanyak 85,82 (105%) dari target 82 sehingga dari tahun 2020 s.d 2024 capaian Implementasi WBK telah tercapai lebih dari 100%. Untuk proyeksi target target tahun 2024 sebesar 82 dan capaian sebesar 88 dikarenakan pada tahun 2025 KPP Kelas I Bandung dapat mengikuti penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) tingkat nasional.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis/setara

Capaian Kinerja implementasi WBK satker pada BKK Kelas I Bandung diperbandingkan dengan capaian kinerja BKK Kelas II Mataram, BKK Kelas II Panjang dan BKK Kelas II Samarinda tahun 2024 maka dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja BKK Kelas I Bandung dengan BKK Sejenis Tahun 2024



Pada grafik tersebut terlihat bahwa BKK Kelas I Bandung dari target 82 telah tercapai 85,82 (105%), BKK Kelas II Mataram dari target 77 telah tercapai 86,50 (113,81%), BKK Kelas II Samarinda dari target 82 telah tercapai 91,84 (112%) dan BKK Kelas II Panjang dari target 79 telah tercapai 84,36 (106,78%), untuk indikator ini dapat disimpulkan bahwa semua BKK telah mencapai target yang telah ditentukan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja Implementasi WBK Satker pada BKK Kelas I Bandung diantaranya :

- a. Semua pihak baik internal maupun eksternal telah melakukan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban sesuai dengan regulasi dan komitmen bersama untuk menegakkan bebas korupsi di lingkungan BKK Kelas I Bandung.
- b. Dukungan dari unit vertikal untuk menguatkan implementasi di internal BKK Kelas I Bandung.

6. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

- a. Melakukan internalisasi WBK di lingkungan BKK Kelas I Bandung secara berulang setiap tahunnya serta mencanangkan komitmen bersama.
- b. Melakukan sosialisasi ke stakeholder bandara maupun pelabuhan, terkait komitmen BKK Kelas I Bandung terhadap WBK
- c. Melakukan kegiatan strategis yang bertujuan untuk lebih membiasakan iklim bebas korupsi di lingkungan BKK Kelas I Bandung, seperti peningkatan integritas petugas, pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terkait WBK.
- d. Pembaruan SK Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung pada tanggal 22 Juli 2024. Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).

7. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Pada Triwulan I s.d II belum ada pendampingan oleh Unit Utama Ditjen P2P maupun dari Inspektorat Jenderal.

Pemecahan Masalah yaitu :

- a. Melakukan Koordinasi dengan Unit Utama Ditjen P2P terkait penilaian WBK pada BKK Kelas I Bandung.

2.1.7 INDIKATOR KETUJUH

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Adalah persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan, pertemuan sosialisasi/seminar, *worskhop*, magang dan kegiatan peningkatan SDM lainnya dengan jumlah jam yang diikuti sebanyak 20 JPL selama 1 Tahun.

d. Defenisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

b. Rumus/Cara Perhitungan

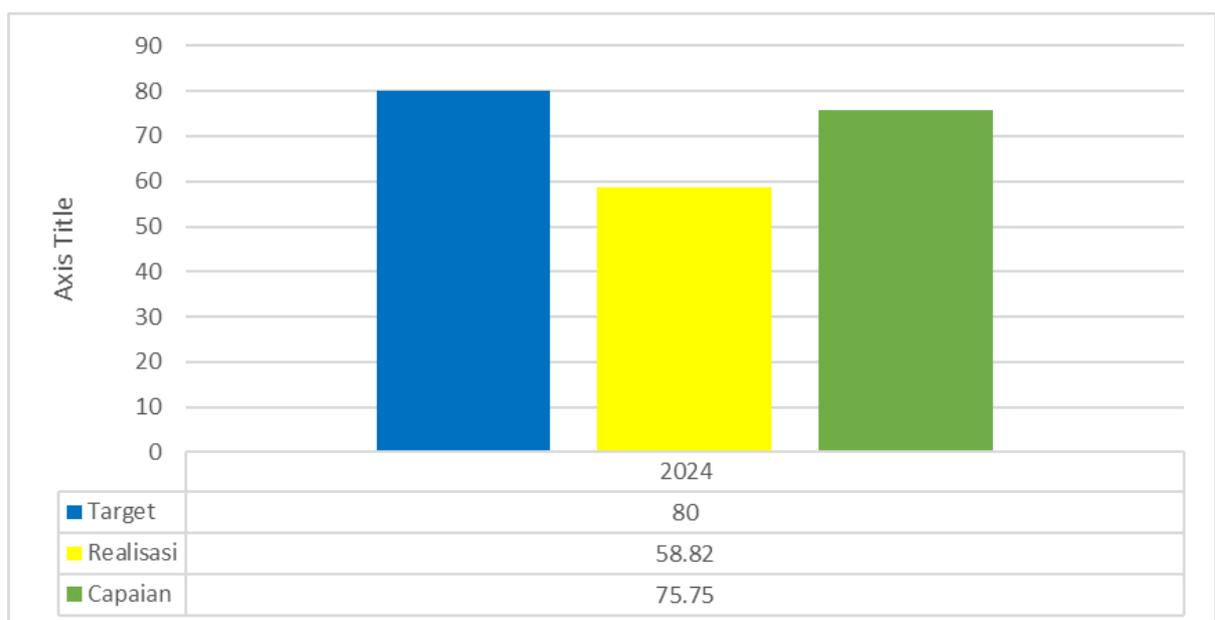
Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

a. Capaian Indikator

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

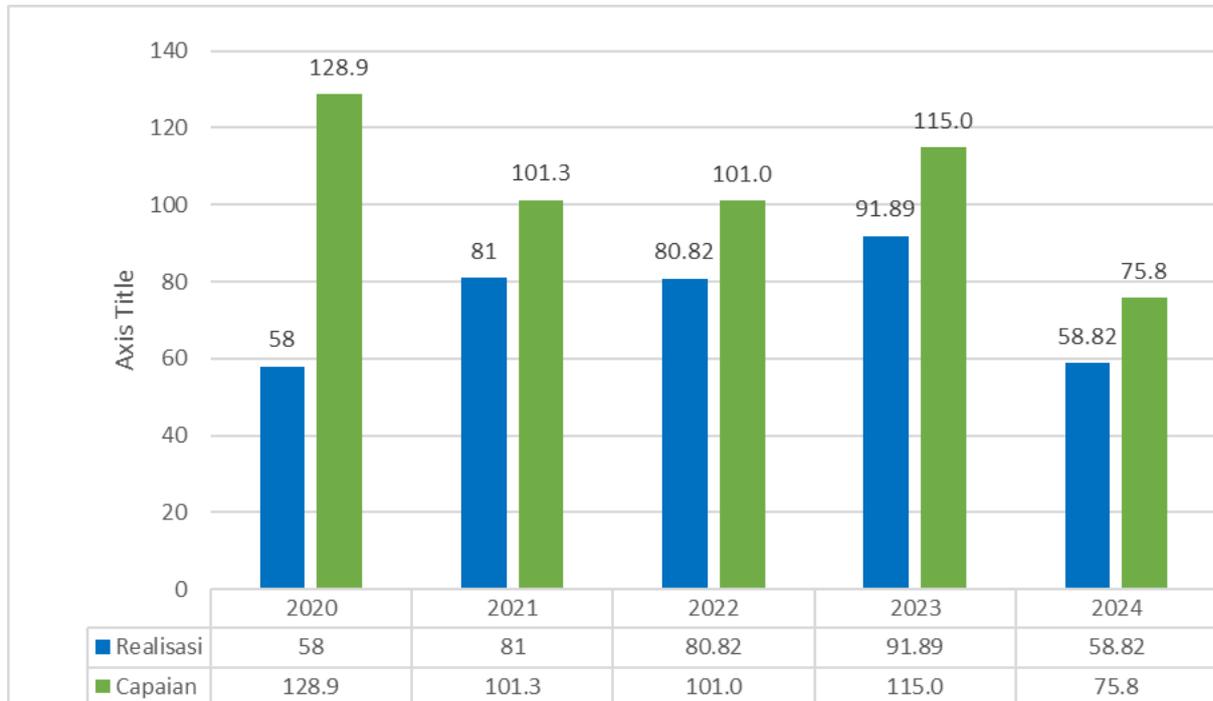
Realiasi dari indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya BKK Kelas I Bandung Semester 1 tahun 2024 sebesar 58.82% % (50 orang) dari nilai target sebesar 80% (66 Orang) dengan capaian kinerja 75.75%, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya JPL di BKK Kelas I Bandung



2. Perbandingan target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya. Adapun nilai perbandingan realisasi dengan capaian kinerja tahun 2020 s.d 2024, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

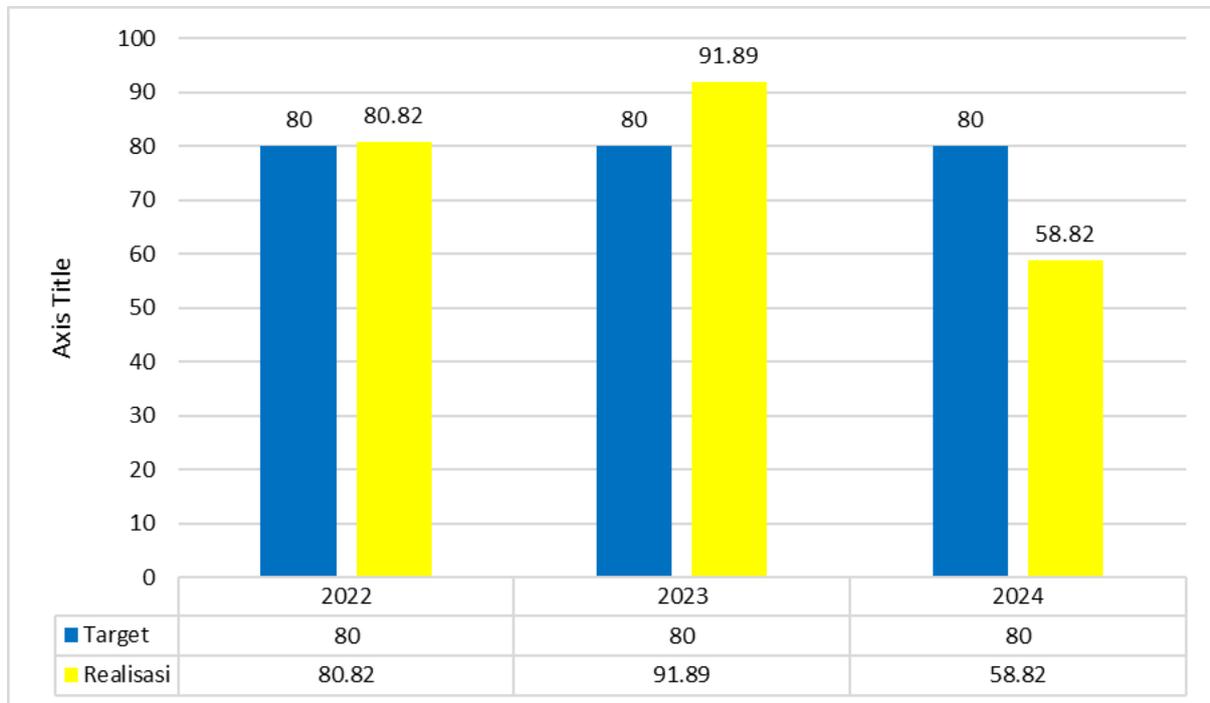
Grafik 3.36 Perbandingan Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya di BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2020 s.d 2024



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi indikator Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan target di tahun 2021 s.d 2024 lebih besar dari tahun 2020 sehingga capaian kinerja tahun 2021, 2023 dan 2024 lebih kecil dari tahun 2020.

3. Perbandingan dengan target Nasional (Renstra/RAP/Permenkes)
 Dalam Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024, target Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2024 yaitu 6000 (enam ribu) orang. Target Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya di BKK Kelas I Bandung pada tahun 2024 sebesar 67 (lima puluh Sembilan) orang.
4. Perbandingan dengan target jangka menengah
 Perbandingan capaian kinerja indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL BKK Kelas I Bandung tahun 2024 dengan target capaian kinerja jangka menengah BKK Kelas I Bandung (Tahun 2023-2024) dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

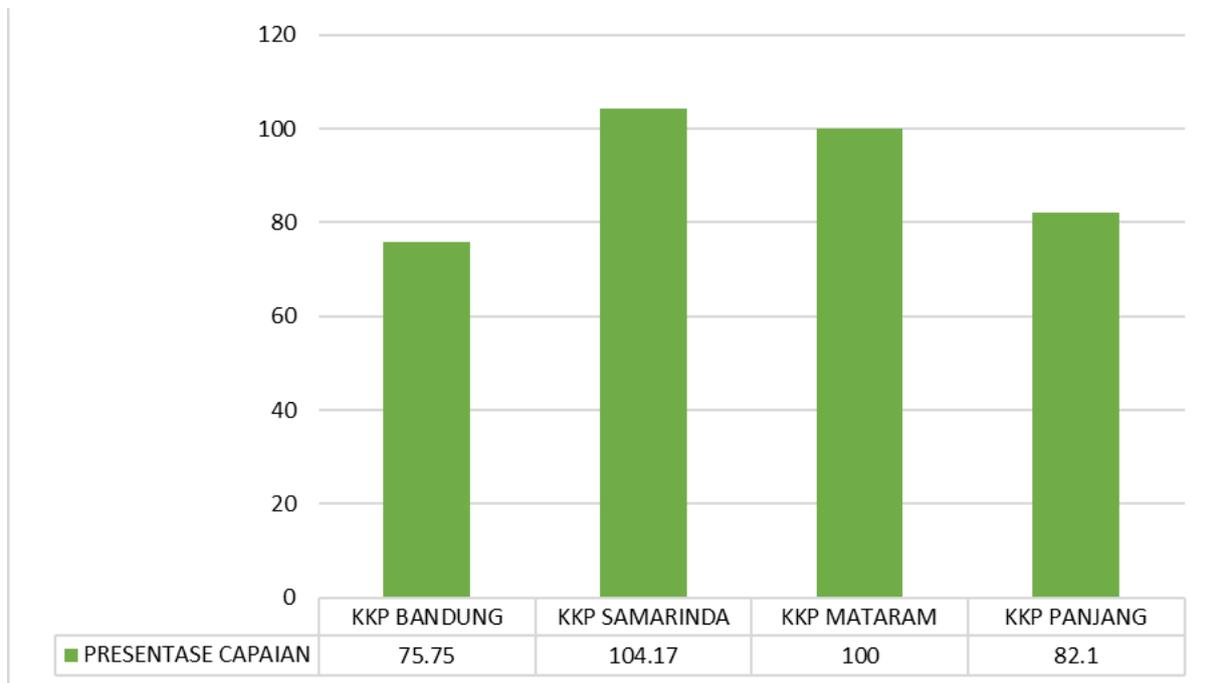
Grafik 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Semester 1 Tahun 2024 Ini Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2023 s.d.2024 sesuai Target Perencanaan Strategis Organisasi



Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari tahun 2022 s.d 2023 tetap stabil dan telah melebihi target jangka menengah sebesar 80%. Untuk tahun 2024, apabila capaian kinerja tetap konsisten maka diperkirakan target untuk tahun 2024 sebesar 80% akan tercapai, mengingat semakin berkembangnya metode pelatihan baik secara luring maupun daring sehingga capaian di tahun 2024 semua pegawai ASN BKK Kelas I Bandung dapat melaksanakan pengembangan kompetensi sebesar 20 JPL.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis/setara
Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya BKK Kelas I Bandung tahun 2024 dengan target capaian kinerja BKK Kelas I Samarida, BKK Kelas I Mataram dan BKK Kelas I Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.38 Perbandingan Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya di BKK Kelas I Bandung pada Tahun 2024 dibandingkan dengan BKK Sejenis



Pada grafik diatas terlihat bahwa pada Semester 1 tahun 2024 BKK Kelas I Bandung dari target 80% telah tercapai 58.82% (75.75%), BKK Kelas I Samarinda dari target 96% telah tercapai 100% (104.17%), BKK Kelas I Mataram dari target 80% telah tercapai 80% (100%), dan BKK Kelas I Panjang dari target 82% telah tercapai 82,10% (100,12%).

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya di BKK Kelas I Bandung TA. 2024 adalah sebagai berikut ;

- a. Adanya media pembelajaran Pelataran Sehat lms.kemkes.go.id yang memuat berbagai macam topik transformasi kesehatan dan transformasi internal dengan metode pembelajaran daring, klasikal dan bauran yang disediakan oleh lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Adanya penyelenggara kegiatan pengembangan yang dilakukan secara daring, membantu dalam kegiatan yang tidak mengharuskan bertatap muka secara langsung.
- c. Kegiatan pengembangan secara online tidak selalu berbayar, sehingga memudahkan pegawai untuk mengikuti tanpa harus melibatkan dana pengembangan pegawai dari kantor.
- d. Pegawai yang telah mengikuti peningkatan kompetensi langsung menginputkan data ke Aplikasi SIPEDIT BKK Kelas I Bandung sehingga memudahkan bagian kepegawaian untuk merekap data pelatihan yang telah diikuti.

7. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Capaian kinerja indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya di BKK Kelas I Bandung tahun 2024 dapat melampaui target dengan didukung kebijakan dan upaya BKK Kelas I Bandung sebagai berikut :

- a. Adanya Pelataran Sehat Kemenkes yang menyediakan berbagai macam pembelajaran dan beragam pilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pegawai.
- b. BKK Kelas I Bandung TA 2024 menganggarkan peningkatan kompetensi pegawai untuk mengikuti pelatihan/workshop.
- c. BKK Kelas I Bandung Tahun 2024 melakukan sosialisasi terhadap pegawainya untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri melalui daring.
- d. Adanya Aplikasi SIPEDIT BKK Bandung yang digunakan untuk merekap data ASN yang sudah memenuhi persyaratan mengikuti peningkatan kompetensi sebanyak minimal 20 JPL dalam satu tahun.

8. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Kendala/Permasalahan yang terjadi yaitu :

- a. Kesibukan waktu kerja setiap pegawai.
- b. Lokasi untuk menghadiri kegiatan Pelatihan jauh dari kantor.

Pemecahan Masalah yang dilakukan yaitu :

- a. Memilih atau mengikuti waktu pembelajaran yang sekiranya tidak mengganggu pekerjaan utama.
- b. Optimalisasi kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan dengan daring/ tidak berbayar agar pegawai bisa mencapai 20 JPL dalam satu tahun.

2.1.8 INDIKATOR KEDELAPAN

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas di tindaklanjuti

a. Defenisi Operasional

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Kemenkes dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK.

b. Rumus/Cara Perhitungan

Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100%.

c. Capaian Indikator

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah tuntas ditindaklanjuti adalah sebesar 95% pada Tahun 2024. Rincian data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 3.39 Target dan Realisasi persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah tuntas ditindaklanjuti

Indikator	Target	Capaian	%
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	100%	

Berdasarkan tabel perbandingan Target dan capaian Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah tuntas ditindaklanjuti tahun 2023 terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,5%.

2. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Upaya yang dilakukan agar indikator kegiatan dapat tercapai yaitu,

- Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang ada
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dengan melibatkan Tim SPIP, PIPK dan SKI yang ada di Satker Balai Kekearifan Kesehatan Kelas I Bandung

3. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Pada indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti sampai dengan Juni 2024 tidak ditemukan kendala/permasalahan pada BKK Kelas I Bandung. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya catatan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023.

2.1.9 INDIKATOR KESEMBILAN

Persentase Realisasi Anggaran

adalah jumlah presentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran

b. Defenisi Operasional

Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran

c. Rumus/Cara Perhitungan

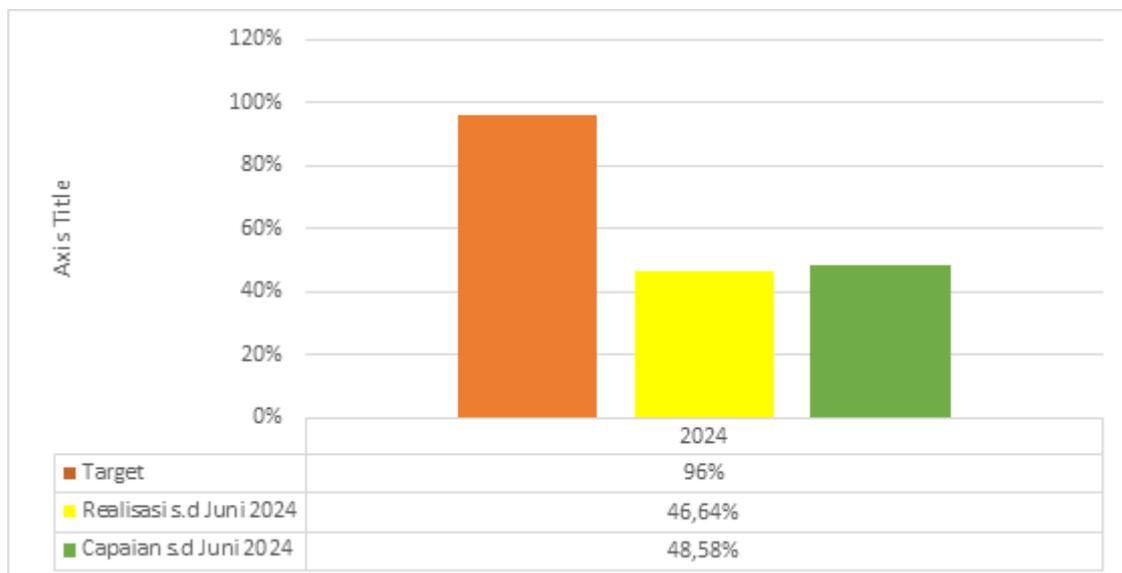
Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%

d. Capaian Indikator

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi dari indikator persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 46,64% dari nilai taget sebesar 96% dengan capaian kinerja 48,58%, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

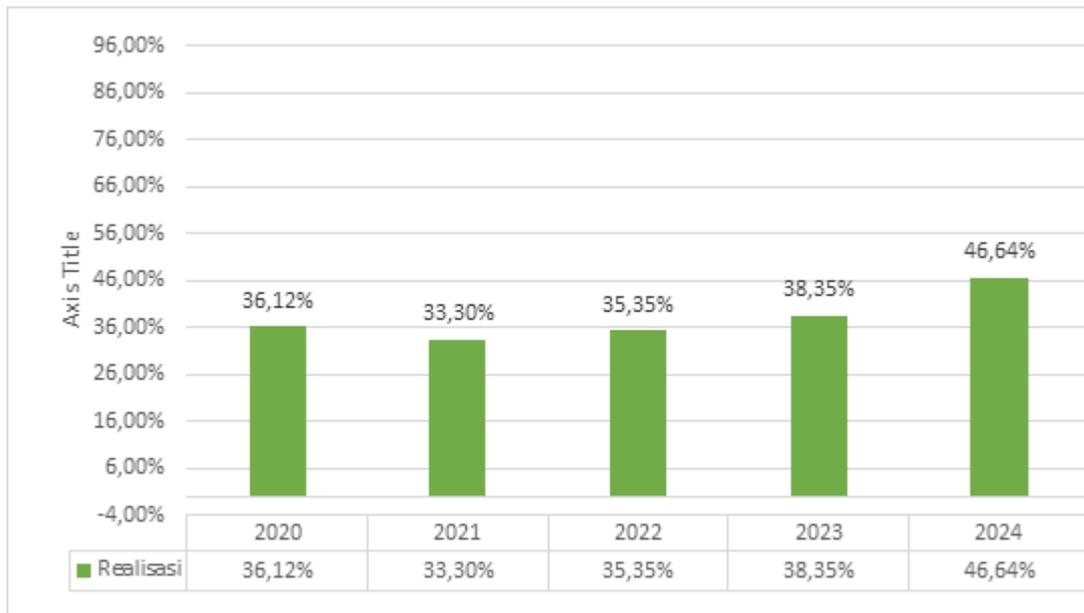
Grafik 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Juni 2024



2. Perbandingan target dan realisasi Juni 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya.

Adapun nilai perbandingan realisasi dengan capaian persentase realisasi anggaran tahun 2020 s.d 2024, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 41 Perbandingan realisasi Juni 2024 dan beberapa tahun sebelumnya

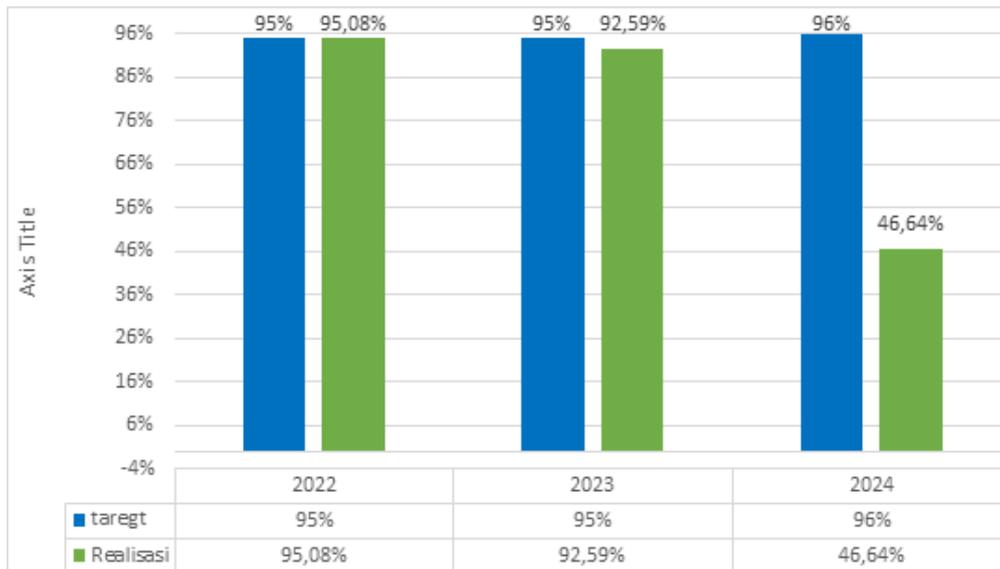


Berdasarkan grafik di atas, pada Semester I tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi indikator Persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2024 kenaikan dipengaruhi telah realisasinya kegiatan besar pelayanan kekarantina kesehatan Embarkasi Haji di mulai pada bulan 10 Mei sd 10 Juni. Pada realisasi belanja modal juga menjadi salah satu yang mempengaruhi kenaikan persentase karena telah terealisasi di semester ini. Kenaikan pada belanja pegawai akibat adanya kenaikan gaji PNS, beberapa pegawai mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional otomatis berakibat naiknya tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional serta penambahan PPPK sebanyak 2 orang

3. Perbandingan dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian kinerja indikator persentase realisasi anggaran bulan Juni 2024 dengan target capaian kinerja jangka menengah BKK Kelas I Bandung (Tahun 2022-2024) dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

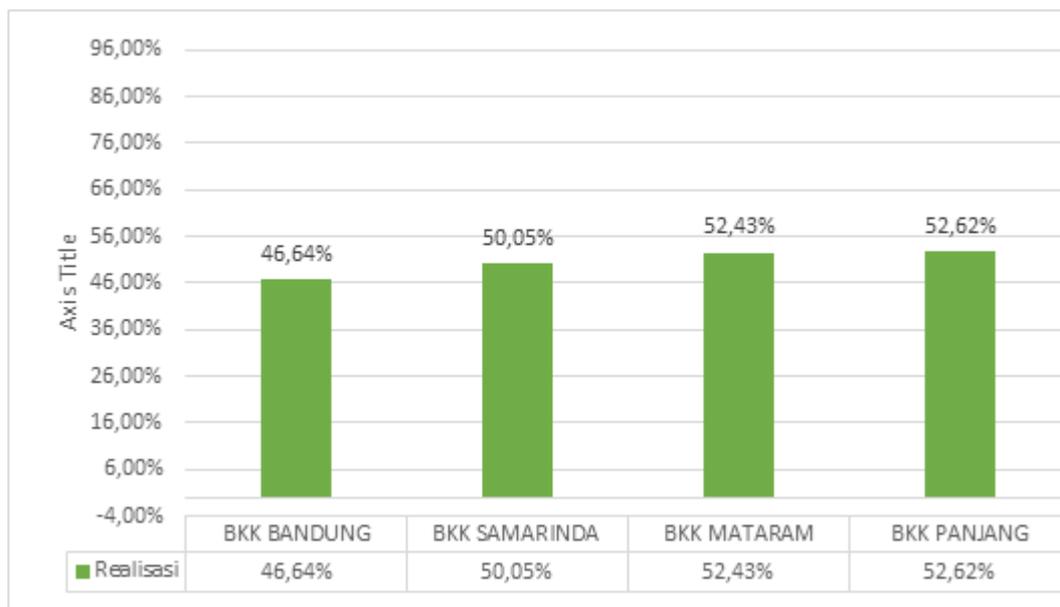
Grafik 3. 42 Perbandingan realisasi dengan capaian kinerja jangka menengah



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi indikator persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2023 karena tahun anggaran 2024 belum berakhir dan masih berjalan.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis/setara
Perbandingan capaian kinerja indikator persentase realisasi anggaran BKK Kelas I Bandung bulan Juni 2024 dengan target capaian kinerja BKK Kelas I Panjang, BKK Kelas I Mataram dan BKK Kelas I Samarinda dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.43 Perbandingan realisasi capaian Juni 2024 dengan BKK sejenis



Pada grafik diatas terlihat bahwa BKK Kelas I Bandung dari target 96% telah tercapai 46,64% (48,58%), BKK Kelas I Samarinda dari Target 96% telah tercapai 50,05% (52,13%), BKK Kelas I Mataram dari target 95% telah tercapai 52,43% (55,19%), dan BKK Kelas I Panjang dari target 96% telah tercapai 52,62% (54,81%). Untuk indikator ini dapat disimpulkan bahwa BKK Kelas I Mataram mencapai Realisasi tertinggi dibanding BKK sejenis sedangkan BKK Kelas I Bandung menjadi terendah dalam mencapai target realisasi pada semester ini.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan/ Kegagalan tercapainya target penyerapan realisasi Anggaran di BKK Kelas I Bandung Semester I TA 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan belanja khususnya belanja modal, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan
- b. Mengutamakan pengajuan belanja bersumber Rupiah murni disaat belanja bersumber PNBPN terhambat
- c. Mengupayakan ketepatan waktu dalam mendaftarkan kontrak ke KPPN, dan tepat waktu dalam pembayaran kontraktual
- d. Pengajuan belanja bersumber PNBPN tidak maksimal pada semester ini karena Maksimum pencairan PNBPN tahap II tidak bisa diajukan apabila setoran PNBPN belum mencapai 80 %
- e. Setoran penerimaan PNBPN lamban dalam mencapai target dari bulan Januari sd Mei, dikarenakan adanya surat edaran mengenai vaksinasi meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib ibadah umroh melainkan diwajibkan bagi jamaah haji dan dianjurkan bagi orang – orang yang memiliki komorbid. Ketetapan ini berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.1/9325/2023 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jemaah Haji dan Umrah, yang diterbitkan pada 11 November 2023. Selain itu adanya Klinik-klinik Swasta yang diberikan ijin untuk melayani vaksinasi meningitis, penerimaan PNBPN terbagi dengan Klinik swasta sehingga penerimaan PNBPN di BKK Bandung kurang maksimal.
- f. Belum optimalnya penggunaan GU KKP
- g. percepatan penyerapan realisasi belanja barang sumber rupiah murni dilakukan di semester II sehingga belanja bersumber Rupiah Murni.

6. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Walaupun Tahun 2024 BKK Kelas I Bandung belum mencapai target Indikator Penyerapan Anggaran diatas 96% tetap selalu berupaya menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Melaksanakan reuiu DIPA minimal per triwulan, meminimalkan revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan
- b. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cutoff
- c. Melakukan percepatan belanja khususnya belanja modal, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan
- d. Berusaha tidak terlambat dalam mendaftarkan kontrak ke KPPN, dan tepat waktu dalam pembayaran kontraktual
- e. Menyelesaikan dan tidak menunda penyelesaian tagihan, lebih teliti dan akurat dalam pengisian SPM.
- f. Menggunakan UP Tunai dan BKK secara efektif dan efisien dan memperhatikan jatuh tempo revolving GUP
- g. Memantau pengajuan SPM dan memitigasi risiko kesalahan rekening rekanan
- h. Menghitung capaian output secara peiodik, tepat waktu dan selalu melakukan monitoring di Aplikasi OMSPAN

7. Kendala/Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kegiatan yang bersumber PNBPN hanya bisa terserap 38.92% atau sebesar Rp 534.513.029 akibat dari target setoran penerimaan PNBPN tidak maksimal di tahun lalu dan mempengaruhi maksimum pencairan PNBPN Tahap I yang hanya diberikan 40% dari pagu belanja PNBPN yaitu Rp 549.407.600. Syarat mengajukan MP PNBPN Tahap II adalah apabila satker mencapai setoran penerimaan PNBPN 80%. Sehingga tidak ada realisasi belanja sumber PNBPN selama bulan Juni 2024
- b. Belum maksimalnya penggunaan GU KKP padahal porsi 40 % dari UP RM
- c. Realisasi capaian output masih dibawah target sehingga nilai konfirmasi capaian output masih belum maksimal

Solusi/pemecahan permasalahan yang dilakukan yaitu:

- a. Berupaya dalam pelaksanaan anggaran memperhatikan RPK RPD dan petugas memahami strategi revisi Hal III DIPA dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA
- b. Mengoptimalkan realisasi belanja bersumber RM yang tidak terdapat hambatan agar bisa menjadi daya ungkit realisasi anggaran satker
- c. Mengajukan MP PNBPN Tahap II di bulan Juli 2024
- d. Melakukan monitoring realisasi penggunaan GU KKP sehingga dapat dioptimalkan penggunaan GU KKP
- e. Koordinasi secara terintegrasi dalam penyusunan capaian output sehingga nilai capaian output sesuai target

2.1.10 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \times Ci) - RA)}{\sum_{i=1}^n AA} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 AA : Alokasi Anggaran Per Indikator
 Ci : % Capaian Indikator
 RA : Realisasi Anggaran Per Indikator
 Ci : Capaian Indikator

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Capaian Keluaran (CKi)	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN	Rp. 4.091.433.000,-	Rp. 2.134.765.295,-	52,18	1	0,48	28%	Tidak Efisien
Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	Rp. 902.362.000,-	Rp. 335.698.981,-	37,20	1	0,63	143%	Efisien

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan /Bandara/PLBN	Rp. 25.920.000,-	Rp. 14.452.900,-	55,76	1	0,44	110	Efisien
Nilai Kinerja Anggaran	Rp. 301.254.000,-	Rp. 65.890.712,-	21,87	1	0,78	195%	Efisien
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rp. 69.648.000,-	Rp. 15.241.957,-	21,88	1	0,78	195%	Efisien
Kinerja implementasi WBK satker	Rp. 83.316.000,-	Rp. 11.775.725,-	14,13	1	0,86	215%	Efisien
Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya	Rp. 142.827.000,-	Rp. 10.238.400,-	7,17	1	0,93	233%	Efisien
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Rp. 225.271.000,-	Rp. 82.300.630,-	36,53	1	0,63	158%	Efisien
Persentase realisasi anggaran	Rp. 19.830.342.000,-	Rp. 9.302.510.456,-	46,91	1	0,53	133%	Efisien

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN

- AA : Rp. 4.091.433.000,-
- RA : Rp. 2.134.765.295,-
- Ci : 100 (1)

$$(4.091.433.000 \times 1) - 2.134.765.295$$

Sehingga E = -----x 100%

$$(4.193.058.000 \times 1)$$

$$E = 0,48$$

$$NE = 50\% + (48.1/20 \times 50) = 28\%$$

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat, angkut, barang dan lingkungan.

- AA : Rp. 902.362.000,-
- RA : Rp. 335.698.981,-
- Ci : 100 (1)

$$(902.362.000 \times 1) - 335.698.981$$

Sehingga E = -----x 100%

$$(902.362.000 \times 1)$$

$$E = 0,63$$

$$NE = 50\% + (63.1/20 \times 50) = 143\%$$

3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN

- AA : Rp. 25.920.000,-
- RA : Rp. 14.452.900,-
- Ci : 100 (1)

$$\text{Sehingga } E = \frac{(25.920.000,- \times 1) - 14.452.900,-}{(25.920.000,- \times 1)} \times 100\%$$

$$E = 0,44$$

$$NE = 50\% + (44.1/20 \times 50) = 110\%$$

4. Nilai kinerja anggaran

- AA : Rp. 301.254.000,-
- RA : Rp. 65.890.712,-
- Ci : 100 (1)

$$\text{Sehingga } E = \frac{(301.254.000 \times 1) - 65.890.712}{(301.254.000 \times 1)} \times 100\%$$

$$E = 0,78$$

$$NE = 50\% + (78.1/20 \times 50) = 195\%$$

5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- AA : Rp. 69.648.000,-
- RA : Rp. 15.241.957,-
- Ci : 100 (1)

$$\text{Sehingga } E = \frac{(282,228,000 \times 1) - 278,333,007}{(282,228,000 \times 1)} \times 100\%$$

$$E = 0,78$$

$$NE = 50\% + (78.1/20 \times 50) = 195\%$$

6. Kinerja implementasi WBK satker

- AA : Rp. 83.316.000,-
- RA : Rp. 11.775.725,-
- Ci : 100 (1)

$$\text{Sehingga } E = \frac{(149,187,000 \times 1) - 137,263,952}{(149,187,000 \times 1)} \times 100\%$$
$$E = 0,86$$
$$NE = 50\% + (86.1/20 \times 50) = 215\%$$

7. Presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya

- AA : Rp. 142.827.000,-
- RA : Rp. 10.238.400,-
- Ci : 100 (1)

$$\text{Sehingga } E = \frac{(354,930,000 \times 1) - 209,759,844}{(354,930,000 \times 1)} \times 100\%$$
$$E = 0,93$$
$$NE = 50\% + (93.1/20 \times 50) = 233\%$$

8. Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

- AA : Rp. 225.271.000,-
- RA : Rp. 82.300.630,-
- Ci : I

$$\text{Sehingga } E = \frac{(149,187,000 \times 1) - 137,263,952}{(149,187,000 \times 1)} \times 100\%$$
$$E = 0,63$$
$$NE = 50\% + (63.1/20 \times 50) = 158\%$$

9. Presentase Realisasi Anggaran

- AA : Rp. 19.830.342.000,-
- RA : Rp. 9.302.510.456,-
- Ci : I

$$(149,187,000 \times 1) - 137,263,952$$

$$\text{Sehingga } E = \frac{\text{---}}{(149,187,000 \times 1)} \times 100\%$$

$$E = 0,53$$

$$NE = 50\% + (53.1/20 \times 50) = 133\%$$

2.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Per Masing - Masing Indikator

Sumber dana Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berasal dari APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun 2024, pada awal tahun BKK Kelas I Bandung memperoleh dana sebesar Rp. 23.854.152.000,- (DIPA No. SP DIPA-024.05.2.415712/2024). Namun pada triwulan II adanya penambahan pada anggaran yang bersumber dari RM sebesar Rp. 1.355.221.000,- sehingga Pagu terakhir s.d Bulan Juni 2024 sebesar Rp. 25.209.373.000,-

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung Semester I TA 2024 berdasarkan Output dan Sumber Dana

No	Kode Output	Nama Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 5.097.886.000,-	Rp. 2.485.903.676,-	48,76
2	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 20.111.487.000,-	Rp. 9.486.756.170,-	46,11

TOTAL	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 11.972.659.846,-	46,64
-------	----------------------	----------------------	-------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran BKK Kelas I Bandung pada Semseter I Tahun 2024 sebesar Rp. 25.209.373.000,- telah teralisasi sebesar Rp. 11.972.659.846,- dengan capaian 46,% dari pagu anggaran. Untuk pagu anggaran Dukungan Pelayanan Kekearantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp. 5.097.886.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.485.903.676,- dengan capaian 48,76% dan pagu anggaran Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp. 20.111.487.000,- telah realisasi sebesar Rp. 9.486.756.170,- dengan capaian 46,11%.

Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Sesuai Masing – Masing Indikator

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian %
Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN	Rp. 4.091.433.000,-	Rp. 2.134.765.295,-	52,18
	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat, angkut, barang dan lingkungan	Rp. 902.362.000,-	Rp. 335.698.981,-	37,20
	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN	Rp. 25.920.000,-	Rp. 14.452.900,-	55,76
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	Rp. 301.254.000,-	Rp. 65.890.712,-	21,87
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rp. 69.648.000,-	Rp. 15.241.957,-	21,88
	Kinerja implementasi WBK satker	Rp. 83.316.000	Rp. 11.775.725,-	14,13
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Rp. 142.827.000	Rp. 10.238.400	7,17
	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Rp. 225.271.000,-	Rp. 82.300.630,-	36,53
	Persentase realisasi anggaran	Rp. 19.830.342.000,-	Rp. 9.302.510.456,-	46,91
JUMLAH		Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 11.972.659.846,-	46,64

Berdasarkan table di atas, realisasi anggaran per indikator semester I tahun 2024 yang paling tinggi yaitu pada indikator Persentase realisasi anggaran sedangkan realisasi anggaran indikator yang paling rendah yaitu pada Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Berikut ini adalah Realisasi anggaran BKK Kelas I Bandung pada semester I tahun anggaran 2024 berdasarkan jenis belanja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung Semester I TA 2024 berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	2024		Capaian %
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp. 11.750.181.000,-	Rp. 5.870.724.620,-	49.69
Belanja Barang	Rp. 13.387.192.000,-	Rp. 6.030.335.226,-	45.05
Belanja Modal	Rp. 72.000.000,-	Rp. 71.600.000,-	99.44
TOTAL	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 11.972.659.846,-	46,64

Realisasi belanja pegawai pada semester I 2024 adalah Rp. 5.870.724.620,- dengan capaian 49,69% dari pagu anggaran. Realisasi belanja barang semester I tahun 2024 adalah Rp. 6.030.335.226,- dengan capaian 45,05%. Sedangkan untuk belanja modal semester I tahun 2024 Rp. 71.600.000,- dengan capaian 99,44%.

b. Realisasi Perincian Output

Pada semester I tahun anggaran 2024, DIPA BKK Kelas I Bandung mengalami revisi DIPA sampai dengan 6 (enam) kali, yaitu:

1. DIPA Revisi 0

DIPA KKP Bandung awal terbit pada tanggal 30 november 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

2. DIPA Revisi I

DIPA KKP Bandung Revisi I (Kanwil) terbit pada tanggal 11 Januari 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

3. DIPA Revisi II

DIPA KKP Bandung Revisi II (Kanwil) terbit pada tanggal 19 Februari 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

4. DIPA Revisi III

DIPA KKP Bandung Revisi III (Kanwil) terbit pada tanggal 21 Februari 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

5. DIPA Revisi IV

DIPA KKP Bandung Revisi IV (DJA) terbit pada tanggal 21 April 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA dan adanya penambahan pagu untuk Debarkasi Haji.

6. DIPA Revisi V

DIPA KKP Bandung Revisi V (Kanwil) terbit pada tanggal 2 Mei 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

7. DIPA Revisi VI

DIPA KKP Bandung Revisi VI (Kanwil) terbit pada tanggal 1 Juni 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

DIPA BKK Kelas I Bandung pada semester I mengalami 6 (enam) kali perubahan anggaran. Berikut ini alokasi anggaran dan target fisik output beserta realisasi anggaran dan realisasi output dari masing-masing output pada DIPA perubahan terakhir (DIPA revisi X) di BKK Kelas I Bandung Tahun 2024.

Tabel 3.11 Alokasi Anggaran dan Target Fisik Output Beserta Realisasi Anggaran dan Realisasi Output dari Masing-Masing Output pada DIPA Semester I Tahun 2024

No.	Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Fisik Output		Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik Output	
1.	001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (kegiatan)	Rp.123.070.000	4	Kegiatan	Rp.52.774.482	0	Kegiatan

No.	Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Fisik Output		Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik Output	
2.	001 Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	Rp. 21.380.000	108	Orang	Rp. 47.74.500	27	Orang
3.	011 Pelayanan kesehatan haji (orang)	Rp. 2.628.487.000	40.480	Orang	Rp.1.505.432.112	40.480	Orang
4.	012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (orang)	Rp. 370.480.000	1.700	Orang	Rp. 27.983.108	763	Orang
5.	016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (layanan)	Rp. 364.768.0000	10	Layanan	Rp. 144.831.421	3	Layanan
6.	017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (layanan)	Rp. 218.270.000	6	Layanan	Rp.96.339.318	0	Layanan
7.	U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (layanan)	Rp. 12.440.000	8	Layanan	Rp.12.400.000	8	Layanan
8.	U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes (layanan)	Rp. 101.700.000	36	Layanan	Rp. 46.877.630	20	Layanan
9.	U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (layanan)	Rp. 345.600.000	96	Layanan	Rp. 17.727.500	48	Layanan
10.	U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare (layanan)	Rp. 21.600.000	60	Layanan	Rp. 11.060.000	30	Layanan
11.	U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (layanan)	Rp. 15.768.000	12	Layanan	Rp. 7.388.000	7	Layanan
12.	U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB (layanan)	Rp. 49.095.000	9	Layanan	Rp. 24.520.000	6	Layanan
13.	001 Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk (paket)	Rp. 1.358.097.000	13	Paket	Rp. 532.809.105	1	Paket
14.	001 Pelatihan kesehatan (orang)	Rp. 78.171.000	16	Orang	Rp. 1.200.000	1	Orang
15.	502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program (kegiatan)	Rp. 219.528.000	2	Kegiatan	Rp. 46.322.712	1	Kegiatan
16.	956 Layanan BMN	Rp. 24.642.000	4	Layanan	Rp. 3.339.050	0	Layanan
17.	957 Layanan Hukum (Layanan)	Rp. 6.186.000	3	Layanan	Rp. 2.708.939	1	Layanan
18.	958 Layanan Hubungan Masyarakat (Layanan)	Rp. 5.860.000	2	Layanan	Rp. 2.014.707	1	Layanan
19.	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	Rp. 11.370.000	5	Layanan	Rp. 671.979	5	Layanan
20.	962 Layanan Umum (Layanan)	Rp. 53.338.1000	6	Layanan	Rp. 215.734.2933	3	Layanan
21.	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	Rp. 59.900.000	1	Layanan	Rp. 6.380.100	0	Layanan
22.	994 Layanan Perkantoran (bulan)	Rp.18.817.026.000	13	Layanan	Rp. 9.079.796.4626	6	Layanan
23.	954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	Rp.10.200.000	4	Orang	Rp. 2.173.400	1	Orang
24.	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Rp. 54.456.000	7	Orang	Rp. 6.865.000	2	Orang

No.	Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Fisik Output		Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik Output	
25.	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	Rp. 81.726.000	3	Dokumen	Rp. 19.568.000	1	Dokumen
26.	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	Rp140.264.000	4	Dokumen	Rp. 51.822.940	2	Dokumen
27.	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	Rp130.013.000	2	Dokumen	Rp. 42.380.597	1	Dokumen
28.	974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	Rp16.935.000	1	Dokumen	Rp. 6.979.701	1	Dokumen

Jika melihat capaian realisasi kinerja semester I tahun 2024, realisasi anggaran BKK Kelas I Bandung pada semester I tahun anggaran 2024 sebesar 46,64% dengan capaian output pada semester I tahun anggaran 2024 sebesar 38,39%.

Tabel 3.12 Perbandingan capaian realisasi anggaran BKK Kelas I Bandung Semester I Tahun 2023 dan 2024

2023			2024		
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
26,732,974,000,-	10,252,997,599,-	38,35	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 11.972.659.846,-	46,64

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 alokasi anggaran kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2024 namun realisasi anggaran semester I tahun 2023 lebih rendah dari pada semester I tahun 2024, hal ini disebabkan karena realisasi belanja modal tahun 2024 dilaksanakan di triwulan II pada bulan mei sehingga realisasi anggaran semester I tahun 2024 lebih besar serta adanya pemantauan dan percepatan pada Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan rencana Pencairan dana.

BKK Kelas I Bandung berupaya dalam pencapaian kinerja dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya beberapa hal, antara lain:

- a. Adanya Aplikasi internal pendukung di BKK Kelas I Bandung seperti SINADI, SIPEDIT, APIIK dan SIMANDJA untuk mendukung ketercapaian kinerja di masing – masing rincian output kegiatan.

- b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan untuk memantau pencapaian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dapat terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENUTUPAN

3.1 KESIMPULAN

1. Pencapaian Kinerja Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Semester I Tahun 2024 telah berjalan cukup baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 87,68%.
2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dari 9 indikator kinerja Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2024, sebanyak 5 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%). Sedangkan 4 Indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan.
3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Semester I tahun 2024 diketahui bahwa presentase realisasi anggaran Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebesar 46,64% dengan realisasi Rp. 11.972.659.846,- dari pagu total sebesar Rp. 25.209.373.000,-
4. Realisasi anggaran tertinggi pada output Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan /Bandara/PLBN.

3.2 TINDAK LANJUT

Berikut ini Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yakni :

1. Tindaklanjut untuk mendorong capaian kinerja yaitu melakukan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan dengan Pusat, UPT, Lintas sektor dan Lintas Program.
2. Tindak lanjut untuk mendorong capaian kinerja agar sesuai dengan target yang ditentukan pada tahun 2024 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mengantisipasi adanya kendala dalam upaya pencapaian tujuan dan melakukan pengendalian terhadap perencanaan yang telah disusun sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Tindaklanjut untuk mendorong capaian kinerja dengan pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi agar kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien.
4. Tindaklanjut untuk mendorong capaian semua capaian kinerja indikator BKK Kelas I Bandung tahun 2024 yaitu Menguatkan pemahaman kepada seluruh ASN BKK Kelas I Bandung terhadap target kinerja dalam perjanjian kinerja termasuk terhadap formulasi hitung sehingga dapat menyusun rencana aksi dalam upaya pencapaian target kinerja.

Segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan, diharapkan dapat diselesaikan dengan perolehan pemecahan masalah yang lebih baik di lingkungan BKK Kelas I Bandung. Demikian Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2024.

Indeks Pengendalian di pintu masuk negara				
Parameter	Target	Realisasi	Capaian	Cara perhitungan
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	0	0	100	Jumlah sinyal SKD yang direspon dengan kelengkapan 80%
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	20	24	120	Jumlah bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≤ 1 dibagi jumlah seluruh bandara/pelabuhan
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	24	24	100	Jumlah bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) dibagi jumlah seluruh bandara/pelabuhan
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	30	34	113	Jumlah bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 dibagi jumlah seluruh bandara/pelabuhan
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	30	30	100	Jumlah bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 dibagi jumlah seluruh bandara/pelabuhan
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	30	36	120	Jumlah bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 dibagi jumlah seluruh bandara/pelabuhan
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	24	36	150	Jumlah bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 dibagi jumlah seluruh bandara/ pelabuhan
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	160	165	103	Jumlah lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaandibagi jumlah seluruh lokus/ TTU
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	135	150	111	Jumlah lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan dibagi jumlah seluruh lokus/ TPM
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	14	14	100	Jumlah lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis dibagi jumlah seluruh lokus kualitas air bersih
Bobot 5 Mutlak				
Bobot 4 Penting				
Bobot 3 Perlu				
Berdasarkan USG (Urgency, Seriousness, Growth)				

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Cov Min	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11	12=3*11
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500,00	100	100	500			
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400,00	100	100	400			-
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300,00	100	100	300			-
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400,00	100	100	400			-
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400,00	100	100	400			-

6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500,00	100	100	500			
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500,00	100	100	500			
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	100	100	400,00	100	100	400			
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	100	100	500,00	100	100	500			
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	100	100	500,00	100	100	500			
					4.400,00			4.400			0
					Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)						
					((6/(9+11))-0						
					1,00						

Kertas Kerja Perhitungan Kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran

Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	CRO	Efisiensi
2019	88,13	100,00	82,12	100,00	5,30
2020	88,48	92,75	82,76	91,67	4,26
2021	87,88	95,78	90,23	97,95	6,10
2022	85,19	95,08	80,47	100,00	4,92
2023	87,12	92,59	92,49	96,72	6,91
2024	42,27	18,04	0	10	0

Kertas Kerja Perhitungan Kinerja indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tahun	IKPA	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2019	97,64	100	82	100	100	100	96	100	100
2020	100	100	75,31	97,33	100	100	88	0	91,67
2021	95,89	100	75,52	87,77	100	100	100	100	97,95
2022	90,76	100	55,73	84,18	86	100	97,24	100	100
2023	93,18	100	59,15	91,58	94,60	100	94,85	100	100
2024	94,39	100	100	97,36	100	100	100	0	79,59

Kertas Kerja Perhitungan Kinerja indikator Kinerja Pelaksanaan WBK Satker

BERITA ACARA HASIL DESK REVIU KINERJA IMPLEMENTASI WBK TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal 19 Bulan Oktober Tahun 2023 telah dilaksanakan desk reviu Kinerja Implementasi WBK Satker berikut ini:

Nama Satuan Kerja : **KKP Kelas II Bandung**

Adapun hasil desk disimpulkan sebagai berikut:

No.	MATERI	NILAI	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	60	52.85
A.	Aspek Pemenuhan	30	27.62
1	Manajemen Perubahan	4	3.41
2	Penataan Tatalaksana	3.5	3.38
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5	4.68
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4.69
5	Penguatan Pengawasan	7.5	7.22
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4.24
B.	Aspek Reform	30	25.23
1	Manajemen Perubahan	4	3
2	Penataan Tatalaksana	3.5	3
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5	4.25
4	Penguatan Akuntabilitas	5	3.51
5	Penguatan Pengawasan	7.5	6.88
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4.59
II	KOMPONEN HASIL	40	32.97
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22.5	17.12
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.5	15.87
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	1.25
2.	Pelayanan Publik yang Prima	17.5	15.85
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17.5	15.85
TOTAL NILAI		100	85.82

Ketua Tim Zi Satuan Kerja,

B. Bayu Sabdo Kusumo, SKM, MKM
NIP 197609282005011001

Mengetahui,
Kepala Satuan Kerja,

dr. Sedya Dwisangka, M.Epid
NIP 196901042002121003

Petugas Desk Eselon 1 Ditjen P2P,

drg. Yossy Agustina, MH
NIP 197808242005012004

Mengetahui,
Ketua Tim Keria Hukormas,

drs. Hadi Suprayitno, MM
NIP 196602231989031004

Kertas Kerja Perhitungan Kinerja Presentase Realisasi Anggaran

Bulan	Pagu	Realisasi	Presentase
Januari	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 639,999,553	2.54
Februari	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 2,323,100,501	9.22
Maret	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 4,959,638,348	19.67
April	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 6,730,724,879	26.70
Mei	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 9,021,590,578	35.79
Juni	Rp. 25.209.373.000,-	Rp. 11.972.659.846,-	46,64